



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2023



DISUSUN OLEH

BAGIAN ORGANISASI  
SETDA KAB. INHIL



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**INSPEKTORAT DAERAH**

JALAN PANGERAN DIPONEGORO NO. 745 TELP. (0768)22909-FAX. (0768) 22140  
TEMBILAHAN 29212

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini (LHR terlampir).

Tembilahan, 28 Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

**BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780418 199701 1 001

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.



Puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Indragiri Hilir 2023 disusun sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atas pelaksanaan

tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki, khususnya kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya dalam proses perwujudan visi dan misi daerah selama satu tahun ke belakang. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 ini memuat informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir periode 2018 – 2023

Akhir kata, kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 sehingga Laporan Kinerja ini bisa bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakaatuh.

Tembilahan,      Maret 2023  
**Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR**



**HERMAN**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara priodik. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kewajiban tersebut dengan menyajikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Pada Tahun 2023, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023, terdapat 34 (Tiga Puluh Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri hilir Tahun 2018-2023 Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improument*).

Adapun pencapaian kinerja yang tertuang dalam Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023, yaitu:

**Misi 1:** “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Makin Responsif, Partisipatif, Inovatif, Efektif dan Berketaatan Hukum”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **84,33%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan/sasaran strategis:

1. Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)
2. Nilai AKIP (Nilai/Predikat)
3. Nilai LPPD (Nilai)
4. Opini BPK atas LKPD (Predikat)
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nilai)
6. Indeks Inovasi Daerah (Kategori)
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

**Misi 2:** “Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Seluruh Wilayah”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **89,38%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

8. Persentase Penyediaan Infrastruktur (Persentase)
9. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki air bersih (Persentase)
10. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (Persentase)
11. Persentase Penyediaan Infrastruktur (Persentase)
12. Cakupan sarana dan prasarana angkutan (Persentase)

**Misi 3:** “Melanjutkan Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Secara Berkelanjutan Sesuai Potensi dan Kondisi Setempat”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **87.19%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

13. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Persentase)
14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)
15. Indeks Kualitas Udara (Indeks)
16. Indeks Kualitas Air (Indeks)
17. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)

**Misi 4:** “Memantapkan Pembangunan SDM yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing Serta Meningkatkan Iman dan Taqwa”, pada tahun 2023 memperoleh nilai

rata-rata sebesar **92,13%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

18. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)
19. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur > 25 Tahun (Tahun)
20. Harapan Lama Sekolah (Tahun)
21. Angka Harapan Hidup (Tahun)
22. Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)

**Misi 5:** “Meningkatkan Partisipasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **84,85%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

23. Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (Persentase)
24. Status indeks desa membangun (Nilai)
25. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)

**Misi 6:** “Memantapkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Kehidupan Sosial”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **100%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

26. Persentase keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (Persentase)
27. Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Persentase)

**Misi 7:** “Melanjutkan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **122.71%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

28. PDRB Per Kapita (Persentase)
29. Persentase Penduduk Miskin (Persentase)
30. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persentase)

**Misi 8:** “Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Daerah”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **192,61%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

31. Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persentase)
32. Nilai Investasi PMDN (Milyar Rupiah)
33. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US Dolar)
34. Indeks Daya Saing Daerah (Kategori)

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 ditetapkan 26 (dua puluh enam) sasaran dengan 34 (tiga puluh empat) indikator, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

❖ Terdapat **12 (dua belas)** atau **35,29%** Indikator Kinerja kategori **sangat baik**, yaitu:

- 1) Indeks Inovasi Daerah
- 2) Persentase Penyediaan Infrastruktur
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 4) Angka Harapan Hidup
- 5) Status Indeks Desa Membangun
- 6) Persentase keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial
- 7) Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 8) PDRB Per Kapita
- 9) Persentase Penduduk Miskin
- 10) Nilai Investasi PMDN
- 11) Nilai Ekspor Bersih Perdagangan
- 12) Indeks Daya Saing Daerah

❖ Terdapat **13 (tiga belas)** atau **38,24%** Indikator Kinerja kategori **baik**, yaitu:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi
- 2) Nilai AKIP
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat
- 4) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak
- 5) Persentase Penyediaan Infrastruktur
- 6) Cakupan sarana dan prasarana angkutan
- 7) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
- 8) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 9) Indeks Kualitas Udara
- 10) Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- 11) Rata –Rata Lama Sekolah Penduduk Umur > 25 Tahun
- 12) Harapan Lama Sekolah

13) Pengeluaran Per Kapita

❖ Terdapat **3 (tiga)** atau **8,82%** indikator kinerja kategori **cukup**, yaitu :

- 1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 2) Indeks Kualitas Air
- 3) Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat

❖ Terdapat **4 (empat)** atau **11,76%** indikator kinerja kategori **kurang**, yaitu:

- 1) Nilai LPPD
- 2) Persentase Rumah Tangga Yang memiliki air bersih
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- 4) Laju Pertumbuhan Ekonomi

❖ Terdapat **2 (dua)** atau **5,88%** Indikator Kinerja **belum didapatkan capaian kinerjanya** dikarenakan realisasi kinerja masih belum dirilis oleh beberapa Kementerian dan BPS untuk tahun 2022 yaitu:

- 1) Opini BPK atas LKPD
- 2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Berkenaan dengan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana diatas, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Bupati Indragiri Hilir Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai harapan dengan total tingkat persentase ketercapaian sebesar 104,94 % atau kategori Sangat Baik. Namun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang belum diketahui dan belum tercapai hasilnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang .....	1
Maksud dan Tujuan LKJIP .....	2
Gambaran Umum Organisasi .....	3
Isu Strategis Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2018-2023 .....	13
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
Rencana Strategis Kab. Inhil Tahun 2018-2023 .....	17
Indikator Kinerja Utama Kab. Inhil Tahun 2018-2023 .....	25
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	31
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 .....	36
Analisis Capaian Kinerja Pemkab Indragiri Hilir Tahun 2023 .....	46
Akuntabilitas Anggaran Pemkab Indragiri Hilir Tahun 2023 .....	164
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Kesimpulan .....	172
<b>LAMPIRAN</b> .....	
<b>PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2023</b> .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	5
Tabel 1.2	Indikator Kependudukan Tahun 2023 .....	5
Tabel 1.3	Indeks Pembangunan Manusia .....	7
Tabel 1.4	Jumlah PNS di Kabupaten Indragiri Hilir .....	12
Tabel 2.1	Perbandingan Tujuan RPJMD Murni dan RPJMD Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 .....	21
Tabel 2.2	Indikator Tujuan/Makro Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 .....	23
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 .....	26
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 ...	32
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran .....	37
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 .....	39
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 .....	40
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah .....	47
Tabel 3.5	Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi .....	48
Tabel 3.6	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi dari Portal RB .....	48
Tabel 3.7	Hasil Nilai Antara Reformasi Birokrasi Kab. Inhil Dari KemenpanRB Tahun 2022 .....	50
Tabel 3.8	Rencana Tindak Lanjut RB 2022 .....	51
Tabel 3.9	Kategori Penilaian SAKIP .....	55
Tabel 3.10	Capaian Indikator Nilai AKIP .....	55
Tabel 3.11	Komponen Dan Pembobotan Nilai Evaluasi SAKIP .....	56
Tabel 3.12	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022 .....	59
Tabel 3.13	Capaian Nilai LPPD 2023 .....	64
Tabel 3.14	Capaian Opini BPK .....	66
Tabel 3.15	Capaian Opini BPK .....	68

Tabel 3.16	Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 .....	71
Tabel 3.17	Capaian Indeks Inovasi Daerah .....	71
Tabel 3.18	Nilai Persepsi IKM .....	79
Tabel 3.19	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat .....	79
Tabel 3.20	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-1 .....	81
Tabel 3.21	Capaian Peningkatan Kualitas Infrastruktur .....	82
Tabel 3.22	Panjang dan kondisi jalan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 .....	83
Tabel 3.23	Jumlah, Panjang dan kondisi jembatan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 .....	84
Tabel 3.24	Indikator Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dan Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik .....	84
Tabel 3.25	Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar ....	84
Tabel 3.26	Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga yang memiliki Air Bersih .....	85
Tabel 3.27	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layanan Sanitasi Layak .....	86
Tabel 3.28	Persentase Fasilitas Tempat Buang Air di Kabupaten Indragiri Hilir ....	87
Tabel 3.29	Persentase Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Indragiri Hilir .....	87
Tabel 3.30	Kondisi Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir .....	88
Tabel 3.31	Capaian Penyediaan Infrastruktur .....	89
Tabel 3.32	Jumlah Masyarakat Pengguna Dermaga/Pelabuhan .....	90
Tabel 3.33	Jumlah Masyarakat Pengguna Terminal .....	90
Tabel 3.34	Jumlah Masyarakat Pengguna Bandar Udara .....	90
Tabel 3.35	Capaian Indikator Sarana dan Prasarana Angkutan Tahun 2023 .....	91
Tabel 3.36	Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Sarana dan Prasarana Transportasi Berkualitas Dinas Perhubungan Tahun 2023 .....	91
Tabel 3.37	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-2 .....	93
Tabel 3.38	Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja .....	95
Tabel 3.39	Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Pelayanan Transportasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 .....	97

Tabel 3.40	Capaian Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan .....	101
Tabel 3.41	Capaian Kualitas Lingkungan Hidup .....	102
Tabel 3.42	Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DLHK TA. 2023 .....	104
Tabel 3.43	Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Udara (IKU) .....	105
Tabel 3.44	Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Air (IKA) .....	107
Tabel 3.45	Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Lahan (IKL) .....	109
Tabel 3.46	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-3 .....	111
Tabel 3.47	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia .....	112
Tabel 3.48	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia .....	113
Tabel 3.49	Capaian Kinerja Mewujudkan SDM Berdaya Saing Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 .....	114
Tabel 3.50	Target dan realiasi capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 s.d 2023 .....	116
Tabel 3.51	Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 s.d 2023 .....	117
Tabel 3.52	Target dan realiasi capaian kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 s.d 2023 .....	118
Tabel 3.53	Harapan Lama Sekolah .....	118
Tabel 3.54	Tabel Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 s.d 2023 .....	120
Tabel 3.55	Pengeluaran Per Kapita .....	121
Tabel 3.56	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-4 .....	123
Tabel 3.57	Capaian Kinerja Meningkatkan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah .....	125
Tabel 3.58	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-5 .....	128
Tabel 3.59	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan ..	129
Tabel 3.60	Capaian Indikator Status Indeks Desa Membangun .....	133
Tabel 3.61	Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 .....	133
Tabel 3.62	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender .....	138
Tabel 3.63	Capaian Kinerja Meningkatkan Kerukunan, Keamanan dan Ketentraman Sosial .....	139

Tabel 3.64	Capaian Indeks Keamanan Ketertiban dan Ketentraman Sosial .....	140
Tabel 3.65	Indikator Persentase Keamanan dan Ketentraman Sosial .....	140
Tabel 3.66	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak .....	142
Tabel 3.67	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-6 .....	144
Tabel 3.68	Capaian Kinerja Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .....	145
Tabel 3.69	Capaian Persentase PDRB Per Kapita .....	147
Tabel 3.70	Capaian Menurunnya Tingkat Kemiskinan .....	148
Tabel 3.71	Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka .....	151
Tabel 3.72	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-7 .....	153
Tabel 3.73	Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah .....	154
Tabel 3.74	Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	155
Tabel 3.75	Capaian Persentase PDRB Per Kapita .....	157
Tabel 3.76	Capaian dan Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri .....	161
Tabel 3.77	Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan .....	160
Tabel 3.78	Capaian dan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah .....	162
Tabel 3.79	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-8 .....	164
Tabel 3.80	Struktur APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 .....	166
Tabel 3.81	Dukungan Anggaran Belanja Langsung maupun Tidak Langsung Tahun Anggaran 2023 .....	168

# BAB I PENDAHULUAN



## **1.1 LATAR BELAKANG**

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban yang peruntukannya, yakni mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ditetapkan melalui media pertanggungjawaban. Pelaksanaannya sendiri, dilaksanakan secara periodik. Keterkaitan akuntabilitas dengan penyelenggaraan pemerintahan ialah akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

### **1.1.1 Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja

maupun capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 merupakan capaian kinerja tahun keempat dari RPJMD periode 2018-2023.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN LKJIP**

Maksud dari penyusunan LKJIP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 adalah untuk menyampaikan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sarana bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyampaikan pertanggungjawaban tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir
2. Bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan akuntabel serta mendorong tercapainya Good Governance;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategis; dan
5. Mendorong Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

### **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Gambaran umum organisasi yaitu dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hilir dijelaskan melalui beberapa aspek yaitu aspek geografis, aspek demografis, aspek daya saing daerah dan aspek pemerintahan, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek geografis menggambarkan luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan;
2. Aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu;
3. Aspek daya saing daerah menggambarkan potensi strategis yang dimiliki Kabupaten
4. Indragiri Hilir; dan
5. Aspek Pemerintahan menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

### 1.3.1 ASPEK GEOGRAFIS

Aspek Geografis menggambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek demografi menggambarkan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir berada pada posisi 0°36" Lintang Utara – 1°07" Lintang Selatan dan 102°32" Bujur Timur–104°10" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 1.352.510 Ha. Batas-batas wilayah kabupaten Indragiri Hilir adalah :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).



Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Sumatera yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau. Posisi Kabupaten Indragiri yang strategis yaitu dekat dengan Selat Melaka dan sejak dulu telah melakukan perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Disisi timur yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan produksi hasil-hasil pertanian Indragiri Hilir dengan mudah dan cepat dibawah ke Kepulauan Riau khususnya Batam. Disisi selatan, Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan Provinsi Jambi dan sekaligus dilintasi oleh jalan Nasional Lintas Timur". Posisi kabupaten yang

strategis dapat menjadi modal dalam pertumbuhan ekonominya.

Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Luas wilayah, jumlah desa dan jumlah kelurahan menurut kecamatan.

### 1.3.2 ASPEK DEMOGRAFI

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2022 sebanyak 660.747 jiwa yang terdiri atas 342.022 jiwa penduduk laki-laki dan 318.725 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0,04 % dengan kepadatan Penduduk 48,85 jiwa/km<sup>2</sup> dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107,31.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Keritang	32.610	31.384	63.994
Kemuning	20.318	18.725	39.043
ReteH	18.419	17.596	36.015
Sungai Batang	5.206	4.881	10.087
Enok	17.791	16.260	34.051
Tanah Merah	13.021	12.262	25.283
Kuala Indragiri	7.663	7.043	14.706
Concong	6.090	5.698	11.788
Tembilahan	40.275	39.034	79.309
Tembilahan Hulu	24.325	23.203	47.528
Tempuling	16.521	15.559	32.080
Kempas	20.187	19.030	39.217
Batang Tuaka	14.384	12.988	27.372
Gaung Anak Serka	11.976	10.907	22.883
Gaung	20.107	18.315	38.422
Mandah	18.023	16.580	34.603
Kateman	20.365	18.966	39.331
Pelangiran	19.199	16.168	35.367
Teluk Belengkong	4.899	4.340	9.239
Pulau Burung	10.643	9.786	20.429
<b>Indragiri Hilir</b>	<b>342.022</b>	<b>318.725</b>	<b>660.747</b>

Sumber : BPS (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2023)

**Tabel 1.2 Indikator Kependudukan Tahun 2023**

Kategori	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk (jiwa)	658.025	660.747
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	48,42	48,85
Seks Rasio (%)	107,7	107,3
<b>Penduduk Menurut Kelompok Umur (jiwa)</b>		
0-14 tahun	170.428	169.081
15-64 tahun	456.702	458.508
> 65 tahun	30.895	33.158

Sumber : BPS (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2023)

Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri seribu parit. Kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan speed boat, pompong, dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala.

Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2022 sebesar 344,5 mm dan 291,3 mm pada bulan April 2021. Sebaliknya rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus 2022 yaitu 150,4 mm dan 22,1 mm pada bulan Februari 2021. Rata-rata curah hujan tahun 2022 mengalami peningkatan 22,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2022 sebanyak 18 hari dan 14 hari pada Desember 2021. Sebaliknya rata-rata hari hujan terendah terjadi pada bulan Juli 2022 sebanyak 9 hari dan 4 hari pada bulan Februari 2021. Rata-rata hari hujan tahun 2022 mengalami peningkatan 21,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

### **1.3.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan atau kemajuan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia, yaitu bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM yang semakin tinggi menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Sumber daya manusia di Kabupaten Indragiri Hilir secara kontinu menjadi fokus pembangunan. IPM Indragiri Hilir meningkat 0,52 poin (0,75 persen) dibandingkan tahun 2022. Capaian IPM ini masuk pada kategori sedang karena berada pada range 60-70. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Riau, terdapat perbedaan 5,31 persen.

**Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia**

Komponen	Satuan	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat			
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,19	72,27
Dimensi Pengetahuan			
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,19	12,20
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,26	7,31
Dimensi Standar Hidup Layak			
Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan	Rp 000	10.234	10.659
IPM		66,63	67,37
Pertumbuhan IPM	Persen	0,09	0,74

Sumber : BPS (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2023)

### 1.3.4 ASPEK PEMERINTAHAN

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan wajib, baik urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan wajib non pelayanan dasar, serta urusan pilihan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu :

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Urusan Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Urusan Sosial.

Sedangkan urusan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 18 Layanan yaitu :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik;Persandiaan;
15. Kebudayaan;
16. Perpustakaan ;
17. Kearsipan.

Adapun urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, terdapat 7 (tujuh) urusan, yaitu : Layanan urusan pilihan yang terdiri dari :

1. Pariwisata;
2. Pertanian;
3. Perdagangan;
4. Perindustrian;
5. Transmigrasi;
6. Kelautan dan perikanan;
7. Pariwisata.

Sehingga total terdapat 31 (Tiga Puluh Satu) urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dibentuk perangkat daerah sebagai berikut:

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. Sekretariat DPRD Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Inspektorat Daerah Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
  - b. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
  - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
  - f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
  - g. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
  - h. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- m. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- n. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- p. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- q. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan, dan olahraga, dan bidang kebudayaan
- r. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- s. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- t. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan lingkup bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan ketahanan pangan.

- u. Dinas Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup bidang perkebunan.
  - v. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
5. Badan Daerah, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
  - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
  - c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
  - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Kecamatan, terdiri dari :
- a. Kecamatan Tembilahan Tipe A.
  - b. Kecamatan Tembilahan Hulu Tipe A.
  - c. Kecamatan Tempuling Tipe A.
  - d. Kecamatan Batang Tuaka Tipe A.
  - e. Kecamatan Concong Tipe A.
  - f. Kecamatan Enok Tipe A.
  - g. Kecamatan Gaung Tipe A.
  - h. Kecamatan Gaung Anak Serka Tipe A.
  - i. Kecamatan Kateman Tipe A.
  - j. Kecamatan Kempas Tipe A.
  - k. Kecamatan Kemuning Tipe A.
  - l. Kecamatan Keritang Tipe A.

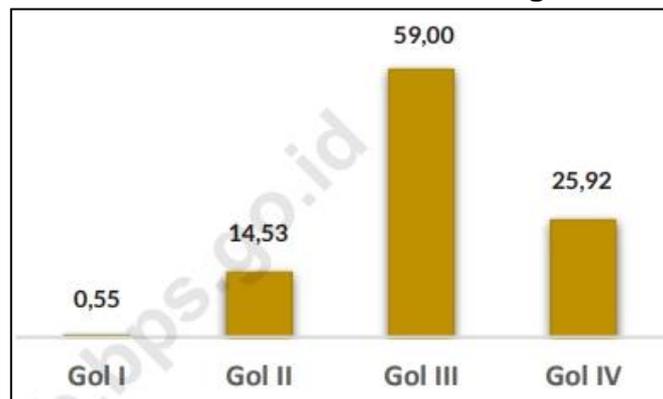
- m. Kecamatan Kuala Indragiri Tipe A.
- n. Kecamatan Mandah Tipe A.
- o. Kecamatan Pelangiran Tipe A.
- p. Kecamatan Reteh Tipe A.
- q. Kecamatan Sungai Batang Tipe A.
- r. Kecamatan Tanah Merah Tipe A.
- s. Kecamatan Pulau Burung Tipe A.
- t. Kecamatan Teluk Belengkong Tipe A

**Tabel 1.4 Jumlah PNS di Kabupaten Indragiri Hilir**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	3.185	3.999	7.184
2019	3.111	4.071	7.182
2020	3.044	4.198	7.242
2021	2.854	4.048	6.902
2022	2.737	3.975	6.712

Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2023

**Gambar 1.1 Jumlah PNS Menurut Golongan Tahun 2023**



Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2023

#### **1.4 ISU STRATEGIS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PRIODE 2018-2023**

Adapun isu-isu strategis penting Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan inovasi pemerintahan yang telah diwujudkan dalam inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya. Untuk memperkuat optimalisasi inovasi pemerintahan tersebut Kabupaten Indragiri Hilir menindaklanjutinya dengan penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mewujudkan pelayanan publik maksimal bagi masyarakat.
2. Pemantapan pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi,serta perumahan perlu penangannan yang lebih baik lagi. hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan,serta infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.Selain itu juga perlu adanya penanganan terhadap Limbah dan Drainase yang mengakibatkan terjadinya genangan apabila hujan deras dan Pasang naik terutama didaerah perkotaan.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir masih di topang dengan potensi pertanian dan perkebunan, akan tetapi pendapatan asli daerah sebagai salah satu penggerak pereknomian daerah masih belum memiliki sumber – sumber potensi pendapatan lainnya yang dapat dijadikan pendapatan asli daerah guna menunjang perekonomian daerah.

4. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lambat. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial dan akses lapangan pekerjaan perlu ditingkatkan.
5. Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Indragiri Hilir teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal Seperti layanan PAUD dan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.
6. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya daerah perdesaan, terlebih lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang harus menjadikan kualitas pelayanan kesejatan bagi masyarakat harus jauh lebih optimal.
7. Pengelolaan potensi sumberdaya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Isu utama terkait dengan pengelolaan potensi sumberdaya alam adalah luas perkebunan kelapa sebesar 61.025 ha yang berada dalam kondisi rusak dan tua, serta diverifikasi produk yang rendah, dimana belum adanya industri – industri hilir dari produk kelapa Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya perkebunan kelapa yakni dengan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, dengan penetapan kawasan perdesaan perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tentunya memberi peluang adanya bantuan terkait pengembangan potensi

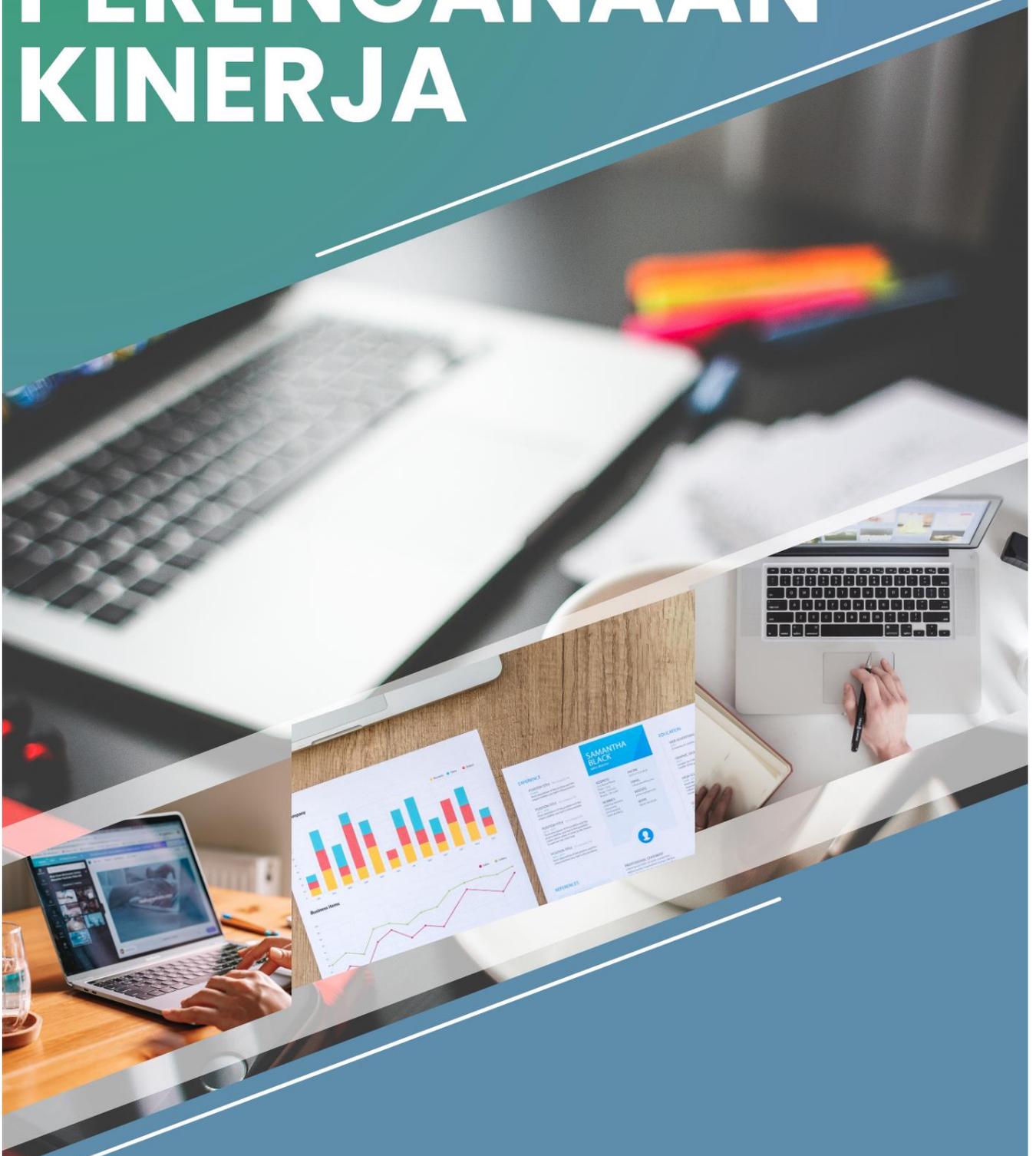
perkebunan kelapa yang akan berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti

- (i) Ekowisata Pantai Solop, Hutan Mangrove seperti Hutan Mangrove Sungai Bela
- (ii) Perbukitan dalam kawasan Bukit tiga puluh seperti Bukit Condong
- (iii) Air Terjun seperti Air Terjun 86, Air Terjun Tembulon Ruso
- (IV) Danau Seperti Danau mablu (V) Wisata Religi seperti Makam Syek Abdurrahman Siddiq Al Banjari dan masih banyak lagi potensi wisata di Indragiri Hilir yang telah ditetapkan dalam Peraturan bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kepariwisataaan. Namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek-objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai. Isu yang cukup menjadi perhatian di Kabupaten Indragiri Hilir adalah kondisi alam gelombang pasang yang mengakibatkan terjadinya abrasi di beberapa wilayah daratan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, upaya rekonstruksi wilayah rawan abrasi melalui pelestarian hutan mangrove dapat menjadi solusinya.

8. Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban. Isu ketentraman dan ketertiban yang menjadi isu daerah dengan ruanglingkup nasional bahkan internasional adalah terkait dengan isu keamanan kejahatan transnasional peredaran narkoba, mengingat kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang masuk dalam daerah terluar Indonesia tentu dapat menjadi pintu masuk bagi peredaran narkoba transnasional yang perlu juga menjadi perhatian.
9. Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi Pada periode sebelumnya Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini maka diluncurkanlah yang disebut dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi. Program ini sebagai

wadah bagi seluruh Stakeholder untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya. Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta mengontrol potensi local Desa sehingga memiliki nilai ekonomis. Desa diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri dan pengelolannya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas.

# BAB II PERENCANAAN KINERJA



## 2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembayaran.

Setelah pelaksanaan RPJMD selama 2 tahun anggaran (Tahun 2019-2020), maka terjadi berbagai dinamika eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain sebagai berikut:

### 1. Perubahan pada Aspek Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perubahan dokumen terhadap RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir dari sisi perumusan dan pelaksanaan dipengaruhi oleh aspek regulasi dan sinkronisasi kebijakan. Beberapa bentuk aspek regulasi adalah adanya perubahan dasar regulasi peraturan perundang-undangan mulai dari PP No. 12 tahun 2019, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomo5 050-3708 tahun 2020 serta surat edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3499/SJ dan No 3 tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Selain itu, berdasarkan surat KEMENPAN RB Nomor : Nomor B/207/AA.05/2023 tanggal 6 Desember 2023 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan reviu (revisi) dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan

perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pohon kinerja yang telah disusun sampai ke level individu.

## 2. Dinamika Pembangunan Nasional dan Daerah

Dinamika pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir dihadapkan pada dampak pandemi COVID-19, sehingga harus dilakukan penyesuaian kembali sesuai program prioritas di tahun berikutnya dengan rencana proyek nasional, yaitu pemulihan ekonomi dan sosial penanggulangan ekonomi untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan daerah.

Perubahan mendasar terhadap RPJMD terjadi diakibatkan adanya pandemi Corona atau COVID-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah, kinerja keuangan dan kinerja pemerintahan sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir harus disesuaikan. Target indikator sasaran yang ditetapkan sampai tahun 2023 perlu disesuaikan terkait adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan pembangunan khususnya bidang perekonomian.

## 3. Evaluasi Ketercapaian RPJMD

Kesimpulan dari Hasil analisis dalam evaluasi hasil RPJMD kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Capaian indikator makro RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2019 dan 2020 menunjukkan Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Gini mampu mencapai target bahkan diatas target, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum mencapai target.
- b. Capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 dan 2020 menunjukkan dari 20 IKU terdapat 10 indikator (50,00 persen) yang melampaui target, 1 (satu) indikator (5,00 persen) yang mencapai target, 9 (sembilan) indikator (45,00 persen) yang belum tercapai.
- c. Capaian Kinerja IKK (tingkat impact) menunjukkan dari 123 IKK tingkat impact pada Tahun 2020, yang memiliki capaian kinerja melampaui sebanyak 50 indikator atau 40,65 persen, Tercapai sebanyak 14 indikator atau 11,38 persen, Belum Tercapai sebesar 50 indikator atau 40,65 persen, dan Tidak Tersedia Data sebanyak 9 indikator atau 7,32 persen.

- d. Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sebesar 77.85 persen dengan Kategori Tinggi dan rata-rata tingkat capaian anggaran program perangkat daerah sebesar 76.77 persen dengan kategori tinggi.

Pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada Pasal 342 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Pada ayat (3) disebutkan bahwa Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dua perubahan mendasar yang telah disebutkan di atas, yaitu (1) krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dan (2) perubahan kebijakan nasional, menyebabkan perlunya dilakukan perubahan pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir juga memperhatikan dokumen terkait lainnya seperti Integrasi kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Isu Pemanasan Global dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan perencanaan pembangunan kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir juga memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

### **2.1.1 Visi**

Berdasarkan hasil penelaahan visi pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025 dan visi misi kepala daerah terpilih, maka visi antara yang hendak diwujudkan Kepala Daerah dalam pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJM) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 adalah;

## **“KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- SEMAKIN MAJU berarti melanjutkan pembangunan yang nyata hasilnya dan benar-benar dirasakan manfaatnya baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah Kabupaten di Indonesia.
- BERMARWAH pengertiannya pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus bergerak bersama, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan spirit yang terus bergelora, berkarya nyata untuk Berjaya dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.
- BERMARTABAT artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsive, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

### 2.1.2 Misi

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD ini merupakan hasil telaahan dan analisis terhadap visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Misi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum.
- 2) Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- 3) Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- 4) Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan iman dan taqwa.
- 5) Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- 6) Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- 7) Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- 8) Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami perubahan karena berbagai kondisi yang terjadi selama masa pelaksanaan pembangunan yang telah dilewati. Berikut perubahan tujuan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir pada perubahan RPJMD periode pembangunan 2018-2023:

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Tujuan RPJMD Murni dan RPJMD Perubahan Kabupaten**  
**Indragiri Hilir**  
**Tahun 2018-2023**

RPJMD MURNI		RPJMD PERUBAHAN	
T.1	Memantapkan kinerja pelayanan publik	T.1	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerah
T.2	Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi	T.2	Peningkatan kualitas

	masyarakat Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan		infrastruktur dasar
T.3	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	T.3	<input type="checkbox"/> Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam <input type="checkbox"/> Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
T.4	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa	T.4	Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa
T.5	Meningkatkan partisipasi sosial Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat	T.5	<input type="checkbox"/> Meningkatkan Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan daerah <input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa
T.6	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	T.6	Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketenteraman sosial
T.7	Menurunkan tingkat pengangguran Menurunkan tingkat Kemiskinan	T.7	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
T.8	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	T.8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

**Tabel 2.2**  
**Indikator Tujuan/Makro Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2018-2023**

<b>VISI : UNTUK KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>					
<b>MISI 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsive, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum</b>					
No	MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI 2018	KONDISI 2023
1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	44,36	79,00
<b>MISI 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah</b>					
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur	Persentase	n/a	51,20
<b>MISI 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat</b>					
3	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam	Persentase	53,04	60,05
<b>MISI 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing</b>					
4	Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,51	68,04
<b>MISI 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan</b>					
5	Meningkatnya partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah	Indeks Partisipasi Sosial	Indeks	60	80
<b>MISI 6 : Memantapkan kerukunan, ketertiban, dan ketentraman kehidupan social</b>					
6	Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial	Indeks Rasa Aman	Indeks	60	61,62

<b>MISI 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran</b>					
7	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	PDRB per kapita	Juta/kapita	58,78	72,5
<b>MISI 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah</b>					
8	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,61	4,90

#### 2.1.4 Strategi dan Arah Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan pembangunan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus dicapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus sasaran dari waktu ke waktu selama masa periode 2018-2023. Arah kebijakan selama 5 tahun tersebut kemudian dijabarkan kepada prioritas dan sasaran pembangunan. Prioritas dan sasaran pembangunan menjadi tahapan pembangunan selama lima tahun yang nantinya akan menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada saat penyusunan RKPd.

Tahapan dalam pencapaian Indragiri Hilir Gemilang pada periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<b>Tema:</b> Meningkatkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	<b>Tema:</b> Memperkuat Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	<b>Tema:</b> Memantapkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	<b>Tema:</b> Lebih Memantapkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	<b>Tema:</b> Menjaga Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir
<b>Fokus:</b> Meningkatkan DMU Plus terintegrasi pada seluruh wilayah desa dan kelurahan, dan rehabilitasi industri kelapa untuk kesejahteraan rakyat	<b>Fokus:</b> Memperkuat DMU Plus terintegrasi melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan pengembangan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat	<b>Fokus:</b> Memantapkan DMU Plus terintegrasi melalui pemantapan infrastruktur dan penguatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan peningkatan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat	<b>Fokus:</b> Lebih memantapkan DMU Plus terintegrasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pemantapan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan pemantapan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat	<b>Fokus:</b> Menjaga DMU Plus terintegrasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan tabel diatas sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa fokus arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir 5 (lima) tahun kedepan adalah

meningkatkan, memperkuat, memantapkan dan menjaga prioritas pembangunan daerah pada Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus (DMIJ-Plus). Hal ini didasarkan pada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat peran desa dalam pembangunan, desa bukan hanya menjadi objek pembangunan tetapi sekarang menjadi subjek pembangunan. Semangat ini diterima di seluruh daerah di Indonesia pada umumnya, Kabupaten Indragiri Hilir khususnya telah menyambut semangat pembangunan desa ini dengan meluncurkan program yang bernama Desa Maju Inhil Jaya. Konsep pemberdayaan masyarakat desa yang diusung pemerintah menjadikan ruh dari program ini. Hal yang paling utama dari program ini adalah efektifitas penggunaan Alokasi Dana Desa, DBH Pajak dan retribusi serta bantuan keuangan yang menyentuh kebutuhan dasar desa. Tujuan akhir dari program ini adalah mendorong kemandirian desa sehingga pada akhirnya desa dapat mengelola potensi yang ada di desa yang kemudian dijadikan PADes untuk membiayai kebutuhan desa mereka sendiri.

## **2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan melalui Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

**TABEL 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum						
1.	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kempan RB RI	Kemenpan RB RI	1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat Daerah
Misi 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah						
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur	Persentase	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur dasar, meliputi : 1. Jalan dan jembatan 2. Air bersih 3. Sanitasi 4. Transfortasi dart/peraian 5. Perumahan	Data Olahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Bappeda 2. Dinas PUTR 3. Dinas LHK
Misi 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat						
3.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam	Persentase	Total kontribusi kinerja pengelolaan sumber daya alam terhadap PDRB, meliputi : 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	Data Olahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Dinas PTPHP 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				2. Pertambangan dan penggalian 3. Industri pengolahan		Perikanan
Misi 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa						
4.	Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Data kinerja merupakan data rilis series dari BPS	BPS	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. RSUD 4. Dinas Sosial
Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan						
5.	Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan	Status Indeks Desa Membangun	Persentase	Rilis Series status IDM oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Kecamatan
Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
6.	Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial	Indeks Rasa Aman	Indeks (persentase)	Hasil survey indeks rasa aman melalui rata-rata nilai persepsi rasa aman, meliputi : 1. Keamanan dan bencana 2. Pemenuhan kesejahteraan social 3. perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan 4. keamanan dan kekerasan	Data Olahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kesbangpol 3. BPBD 4. Damkar
Misi 7 :Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran						
7.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	PDRB per kapita	Juta/kapita	Data Kinerja merupakan data rilis series BPS	BPS	1. Disnakertrans 2. Dinas Sosial 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
8.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100\%$ <p>Adapun keterangan simbol dari rumus tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ R = laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen</li> <li>▪ PDB<sub>rt</sub> = Produk Domestik Bruto pada tahun tertentu (rt)</li> <li>▪ PDB<sub>rt-1</sub> = Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya (rt-1)</li> </ul>	BPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPMPSTP</li> <li>2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>4. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</li> <li>5. Setda</li> </ol>

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 serta dengan mempertimbangkan Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PAN RB Nomor B/207/AA.05/2023 dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja bersama Tim Evaluator KemenPANRB

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang Waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja dengan dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023**

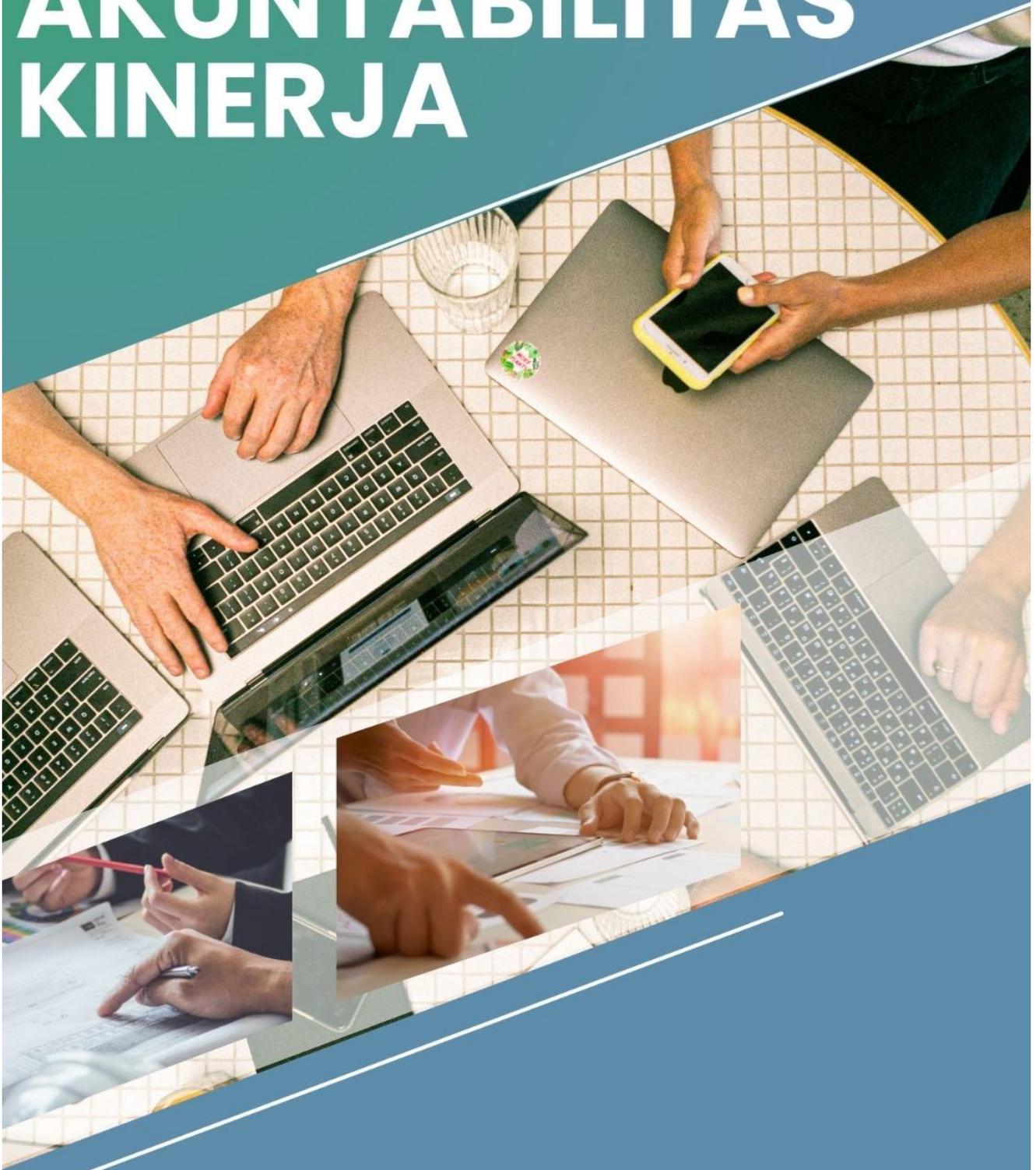
<b>No Urut</b>	<b>No Indikator</b>	<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>
1	2	3	4	5	6
1	1.1	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	79.00
2	1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai AKIP	Nilai/ Predikat	BB
3			2. Nilai LPPD	Nilai	Sangat Tinggi
4			3. Opini BPK atas LKPD	Prediket	WTP
5			4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,00
6			5. Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif/Zona Hijau
7	1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,22
8	2.1	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	Persentase penyediaan infrastruktur	Persentase	51,20
9	2.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan insfastruktur pemukiman	1. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki air bersih	Persentase	52,00

No Urut	No Indikator	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
10			2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Persentase	70
11	2.1.2	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Persentase Penyediaan Infrastruktur	Persentase	60
12	2.1.3	Meningkatnya pelayanan transportasi	Cakupan sarana dan prasarana angkutan	Persentase	73,80
13	3.1.1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase	49,61
14	3.2	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,66
15	3.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,61
16			2. Indeks Kualitas Air	Indeks	53,78
17			3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	49,05
18	4.1	Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,04

No Urut	No Indikator	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
19	4.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur > 25 tahun	Tahun	7,86
20			2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,56
21	4.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,4
22	4.1.3	Pengeluaran per kapita (Rp per kapita per tahun)	Pengeluaran per kapita	Ribu Rupiah	14.200
23	5.1.1	Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat	Persentase	80
24	5.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Status indeks desa membangun	Status	Maju
25	5.2.2	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,00
26	6.1.	Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial	Persentase keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)	Persentase	100
27	6.1.2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	persentase	100
28	7.1	Meningkatkan	PDRB per kapita	Persentase	72,5

No Urut	No Indikator	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
		kesejahteraan Masyarakat	(Rp)		
29	7.1.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persentase	5,00
30	7.1.2	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	Persentase	3,00
31	8.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,90
32	8.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rupiah	1,100
33	8.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor Daerah	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Juta US Dolar	330
34	8.1.4	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Kategori	Tinggi

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





**Akuntabilitas kinerja** adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas

kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

### 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

#### 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan kinerja pemerintah maka dapat dilihat capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dapat diukur dengan melihat realisasi dari target indikator kinerja utama yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) antara Bupati Indragiri Hilir dengan Menteri PANRB tahun 2023. Dasar Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada hasil analisis antara target dalam dokumen RPJMD 2018-2023 No 2 Tahun 2022. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran.

Untuk memudahkan digunakan media formulir Pengukuran Kinerja, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupten Indragiri Hilir. Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut :

1. *Semakin tinggi realisasi* menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Target

2. *Semakin tinggi realisasi* menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**

No	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	Lebih dari 100	
2	Baik	75,00 – 99,99	
3	Cukup	65,00 – 74,99	
4	Kurang	50,00 – 64,99	
5	Sangat Kurang	0 – 49,99	

Dalam melakukan pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari beberapa sumber, yaitu :

- 1) Data Internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan Kegiatan Regular, Laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah / Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan kegiatan lainnya maupun data pendukung lainnya;
- 2) Data Eksternal, digunakan data-data sekunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya data-data yang bersumber atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023. terdapat :

- ❖ **Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Makin Responsif, Partisipatif, Inovatif, Efektif Dan Berketaatan Hukum.** terdiri atas: 1 tujuan, 2 sasaran, dan 7 indikator kinerja.
- ❖ **Misi 2 : Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Wilayah.** Terdiri atas : 1 tujuan, 3 sasaran, dan 4 indikator kinerja.
- ❖ **Misi 3 : Melanjutkan Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Secara Berkelanjutan Sesuai Potensi dan Kondisi Setempat.** terdiri atas : 2 tujuan, 2 sasaran, dan 5 indikator kinerja.
- ❖ **Misi 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing Serta Meningkatkan Iman dan Taqwa.** terdiri atas : 1 tujuan, 3 sasaran, dan 5 indikator kinerja.
- ❖ **Misi 5 : Meningkatkan Partisipasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.** terdiri atas: : 2 tujuan, 3 sasaran, dan 3 indikator kinerja.
- ❖ **Misi 6: Memantapkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Kehidupan Sosial.** terdiri atas : 1 tujuan, 2 sasaran, dan 2 indikator kinerja.

- ❖ **Misi 7: Melanjutkan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran.**  
terdiri atas : 1 tujuan, 2 sasaran, dan 3 indikator kinerja.
- ❖ **Misi 8 :Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Daerah.**  
terdiri atas : 1 tujuan, 4 sasaran, dan 5 indikator kinerja.

Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dilakukannya pengukuran kinerja pada tahun 2023, maka adapun hasil capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021**

No	Prediket	Rata-rata % Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat Baik	>100	
2	Baik	75,00 - 99,99	
3	Cukup	65,00 – 74,99	
4	Kurang	50,00 – 64,99	
5	Sangat Kurang	0 – 49,99	
	N/A		
<b>JUMLAH</b>			

Dari tabel diatas dapat diuraikan :

Prediket sangat baik dengan nilai rata-rata capaian diatas 100% sebanyak indikator atau Prediket baik dengan nilai rata-rata capaian berkisar 75,00 - 99,99% sebanyak indikator atau Prediket cukup dengan nilai rata-rata capaian berkisar 65,00 – 74,99% sebanyak indikator atau Prediket kurang dengan nilai rata-rata capaian berkisar 50,00 – 64,99 % sebanyak indikator atau Prediket sangat kurang dengan nilai rata-rata capaian berkisar 0-49,,99 % sebanyak indikator atau Prediket N/A atau nilai rata-rata capaian belum diperoleh sebanyak indikator atau

Adapun rincian capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Meningkatkan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	79.00	71,79	91%	Baik
1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai AKIP	Nilai/ Predikat	BB	B	90%	Baik
		2. Nilai LPPD	Nilai	Sangat Tinggi	Rendah	60%	Kurang
		3. Opini BPK atas LKPD	Prediket	WTP	N/A	N/A	N/A
		4. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3.00	2,23	70%	Cukup
		5. Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%	Sangat Tinggi

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,22	84,89	95%	Baik
2.1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase Penyediaan Infrastruktur	Persentase	51,20%	68,98%	135%	Sangat Baik
2.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur pemukiman	1. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki air bersih	Persentase	52%	26,51%	50,98%	Kurang
		2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	Persentase	70%	54,91%	78,44%	Baik

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
		sanitasi layak					
	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Persentase Penyediaan Infrastruktur	Persentase	60%	56,08%	93,47%	Baik
2.1.2	Meningkatnya pelayanan transportasi	Cakupan sarana dan prasarana angkutan	Persentase	73,80%	65,71%	89%	Baik
3.1.1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase	49,61%	46,67%	94%	Baik
3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,66	58,13	85,91%	Baik
	Meningkatnya kualitas SDM yang	Indeks Kualitas	Indeks	90,61	85,34	94,18%	Baik

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.2	berdaya saing, beriman dan bertaqwa	Udara					
		Indeks Kualitas Air	Indeks	53,78	35,10	65,27%	Cukup
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	49,05	47,38	96,60%	Baik
4.1	Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,04	69,64	102,35%	Sangat Baik
4.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur>25 tahun	Tahun	7,86	7,31	93%	Baik
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,56	12,20	89,97%	Baik

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,4	68,62	100,32%	Sangat baik
4.1.3	Pengeluaran per kapita (Rp per kapita per tahun)	Pengeluaran per kapita	Ribu Rupiah	14.200	10.659	75%	Baik
5.1.1	Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat	Persentase	80%	55,8%	69,7%	Cukup
5.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Status indeks desa membangun	Nilai	20	20	100%	Sangat Baik
5.2.2	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,00	N/A	N/A	N/A
6.1.	Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial	Persentase keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
		(indeks)					
6.1.2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	persentase	100%	100%	100%	Sangat Baik
7.1	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	PDRB per kapita (Rp)	Persentase	72,5%	143,77 %	198,33%	Sangat Baik
7.1.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persentase	5%	5,64%	112,8%	Sangat Baik
7.1.2	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	Persentase	3%	1,71%	57%	Kurang
8.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,90%	3,17%	64,69%	Kurang
8.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rupiah	1.100	3.627	329,73%	Sangat Baik
8.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor Daerah	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Juta US Dolar	330	914	276%	Sangat Baik
8.1.4	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	100%	Sangat Baik

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

Penyusunan rencana pembangunan tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan baik Pemerintah Provinsi Riau maupun Kabupaten Indragiri Hilir dengan memperhatikan kebijakan nasional khususnya untuk rencana pembangunan tahun 2023. Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

#### **Tujuan 1 Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**

Sejalan dengan prinsip-prinsip birokrasi modern, reformasi birokrasi adalah upaya untuk merubah praktek-praktek birokrasi yang tidak efektif menuju ke arah praktek-praktek administrasi pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi sangat diperlukan untuk menciptakan *clean* dan *governance*. Reformasi Birokrasi pada dasarnya ditujukan pada tiga aspek, yaitu struktur organisasi, sistem yang mengatur dan orang-orang yang melaksanakannya.

Tujuan Ke-1 pada capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dengan 2 sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel, dan Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. Tujuan ke-1, diukur dengan 7 (Tujuh) indikator yaitu Indeks RB, Nilai AKIP, Nilai LPPD, Opini BPK Atas LKPD, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Tar get	Reali sasi		Tar get	Reali sasi	
1	Indeks RB	Prediket	72	62.19	86%	79	71.79	91 %
2	Nilai AKIP	Prediket	B	B	100%	BB	B	92 %
3	Nilai LPPD	Nilai	Ting gi	Sangat Renda h (1,33)	33 %	Sangat Tinggi	Rendah 2.4218	66 %
4	Opini BPK Atas LKPD	Prediket	WTP	WTP	100%	WTP	Dalam Pelaksan aan Audit	NA
5	Sistem Pemerinta h Berbasis Elektronik	Nilai	2,09	2.13	101 %	3	2.23	74 % %
6.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sang at Inov atif	Sangat Inovatif	100 %	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100 %
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,6 5	84,31	97.19 %	89,22	84,89	95 %
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>101,06 %</b>			<b>86%</b>

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, rata-rata Capaian Kinerja pada Tahun 2023 adalah 86 % dan Rata-rata Capaian Kinerja pada tahun 2023 sebesar 101,06 % Artinya capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar 15,%. Tujuan Memantapkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik terdapat 1 indikator kinerja belum dapat dihitung capaiannya pada tahun 2023 yakni Opini BPK atas LKPD dikarenakan Masih dalam pelaksanaan Audit.

### Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi Merupakan sebuah kewajiban yang melekat Pada suatu instansi pemerintah agar dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan baik dan mampu menjadi katalisator dalam pencapaian pembangunan. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan salah satu perhatian utama.

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72,00	62,19	88,00%	79	71.79	91 %

*Sumber; Portal RB KemenpanRB*

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2023 yang telah Publikasikan oleh KemenpanRB melalui Portal RB Nasional sebesar 71.79 %. dengan capaian Realisasi RB sesuai dengan Target pada Perjanjian Kinerja dan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 91 %. Dari Target RPJMD Akhir Kabupaten Indragiri Hilir tidak tercapai target sebesar 7.21 %. Secara Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Naik sangat signifikan drari B (Baik) menjadi BB (sangat Baik) yakni pada tahun 2022 Nilai RB memperoleh 62.19 dan pada tahun 2023 memperoleh Nilai RB menjadi 71.79 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Hasil Nilai Reformasi Birokrasi dari Portal RB**

Komponen	Nilai
RB General	60,15
RB Tematik	11,64
Total Nilai	71,79
Total Bobot RB General/RB Tematik	100

indeks reformasi birokrasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan 9,6 %. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen RB General dan RB Tematik.



Berdasarkan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 oleh Kementerian PAN RB, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh Nilai 71.79 dengan kategori BB. hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada Penyusunan RoadMAP RB General dan RB Tematik. simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

**SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB**

Selamat datang, **indragirihilir.d379.1**

Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

RB General	60.15
RB Tematik	11.64
<b>Total Nilai</b>	<b>71.79</b>
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyusunan	100
RB General Penyusunan	60.15
Indek RB	71.79
File Berkas	

PDF Excel Show 10 entries Search

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 adalah 71,79 dengan kategori “BB”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah

sebagai berikut

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Terdapat 11 hasil antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Hasil Nilai Antara Reformasi Birokrasi Kab. Inhil dr KemenpanRb tahun 2022**

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	281,5	289,0	KASN
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	40,08	39,99	LAN
3.	ASN yang Profesional	0-100	40,08	57,06	BKN
4.	Implementasi SPBE	0-5	2,24	2,15	Kementerian PAN RB
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	9,48	36,80	LKPP
7.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,15	3,33	Kementerian PAN RB
8.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
9.	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	22,59	29,67	ANRI
11.	Reformasi Hukum	0-100	-	49,15	Kementerian Hukum dan HAM

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian sistem merit, kualitas kebijakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan public, dan kualitas pengelolaan arsip. Meskipun demikian, implementasi SPBE, dan kepatuhan standar pelayanan publik mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2021.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/  
Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integrasi kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu : Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Dari Rekomendasi Kemenpan RB sebagai berikut :

**Tabel 3.8  
Rencana Tindak Lanjut RB 2022**

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Perbaikan	Outcome yang dihasilkan
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh program reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan PMPRB	Melakukan asistensi peningkatan kapasitas asesor  	1. Bimtek dan peningkatan kapasitas 2. Pendampingan evaluasi RB    BIMTEK PENGUATAN IMPLEMENTASI SAKIP 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2.	Meningkatkan pelaksanaan internalisasi reformasi birokrasi pada seluruh anggota organisasi dan unit kerja untuk menyamakan pemahaman dalam penerapan reformasi birokrasi sehingga dapat terwujud hasil perubahan unit kerja yang berkontribusi terhadap perubahan birokrasi ke arah yang lebih efektif dan efisien.	Melakukan peningkatan kapasitas kepada seluruh anggota organisasi dan unit kerja terkait Reformasi Birokrasi	
3.	Menyusun peta proses bisnis sampai level terendah dan memastikan kesesuaian dan kelengkapan SOP atas seluruh aktifitas yang ada;	Melakukan perbaikan atau penyusunan Proses bisnis SOP	<p>1. Dokumen Peta Proses Bisnis</p> <p>2. Dokumen SOP</p> 
4.	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan arsitektur SPBE Nasional;	Melakukan perbaikan dan penyusunan peta rencana SPBE sehingga dapat mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE terintegrasi	Dokumen Peta Rencana SPBE
5.	Menyusun kebijakan manajemen talenta dan	Meningkatkan pengelolaan SDM yang	Laporan Ketersediaan data pegawai yang akan

<p>melaksanakan assesment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB No.40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN;</p>	<p>lebih efektif</p> <p>Menguatkan pelaksanaan sistem merit yang komprehensif pada seluruh unit kerja pemerintah daerah</p>	<p>memasuki masa pension dalam 5(lima) tahun yang disusun menurut jabatan,pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir yang up do date</p> <p>Dokumen rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun) berdasarkan Anjab ABK</p> <p>Dokumen Rencana Pengadaan ASN berdasarkan Anjab, ABK serta potensi daerah</p> <p>Dokumen kebijakan internal tentang pengadaan ASN</p>
---	---	---

Pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (governance), semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode Road Map terakhir Grand Design RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat. Road Map RB 2020–2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

## **Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Dan Tematik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023**

Berdasarkan surat kementerian PAN RB No.B/37/ AA05/2023 tentang Tindaklanjut Penyusunan RoadMap Reformasi Birokrasi. Kabupaten Indragiri Hilir Periode RPJMD berakhir tahun 2023 sehingga tidak diwajibkan melakukan penyusunan RoadMap RB Instansi namun tetap menyusun rencana Aksi perubahan RoadMap RB 2020-2024 sesuai dengan surat KemenpanRB No:B/98/RB/00/2023/ Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya, ini yang disebut sebagai RB General. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen mewujudkan 23 (dua puluh tiga) Kinerja Utama RB General. Sedangkan dalam pelaksanaan RB Tematik, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan seluruh tema yang telah ditentukan sesuai dengan Road Map RB Nasional yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Pemerintahan, dan Program prioritas presiden yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi.

### **Nilai AKIP**

Seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahun yang merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, dilakukan evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. Untuk melaksanakan evaluasi SAKIP tersebut maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut

merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah:

1. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

**Tabel 3.9**  
**Kategori Penilaian SAKIP**

Kategori	Range-Nilai	Keterangan
AA	90-100	Sangat Memuaskan
A	80-90	Memuaskan
BB	70-80	Sangat Baik
B	60-70	Baik
CC	50-60	Cukup
C	30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Sumber : KemenpanRB 2017

Pencapaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Capaian Indikator Nilai AKIP**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP	Nilai	BB(70)	B (64,52)	90,00%	BB	B	92.00%

Sumber LHE KemenpanRB No B/207/AA/05/2023 tanggal 27 Nopember 2023

Pengukuran Nilai AKIP menggunakan indikator kinerja yang digunakan yakni Nilai AKIP KementerianPANRB. Target IKU Evaluasi Nilai AKIP tahun 2023 adalah prediket BB Berdasarkan Range dimana Nilai Kategori BB adalah > 70-80 dan Pengukuran Nilai AKIP tahun 2023 memperoleh Nilai 64,52 dengan Kategori B dan

Range Nilai 60-70. Target yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir Hampir Tercapai yakni Nilai Kategori BB dengan Indeks Nilai 70.-80. Dengan demikian Realisasi Nilai AKIP ini dibawah Target Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tetapi capaian kinerjanya 93% dengan Interpretasi sangat Tinggi.

Perbandingan Realisasi capaian atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 dan 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari Tabel berikut :

**Tabel 3.11  
Komponen Dan Pembobotan Nilai Evaluasi SAKIP**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,50	22,51
b.	Pengukuran kinerja	30	18,30	18,64
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,90	9,96
d.	Evaluasi Internal	25	13,40	13,41
Nilai Hasil Evaluasi		100	64,10	64,52
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>	<b>B</b>

Nilai AKIP pada tahun 2023 mengalami peningkatan 0,42 %. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya komponen Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/  
Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan**

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 sebagai berikut:

**1) Perencanaan kinerja**

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat Perangkat Daerah (PO).

Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum memiliki pedoman perencanaan yang secara komprehensif dapat digunakan sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan daerah;
- b. Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya berdasarkan identifikasi Critical Success Factor (CSF) atas pencapaian kinerja, sehingga belum mampu menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- c. Masih terdapat sasaran yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati dan PD Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:
  - Sasaran efektifnya program transmigrasi dengan indikator jumlah warga transmigrasi yang bina pada Disnakertrans;
  - Persentase penyediaan infrastruktur pada sasaran meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum pada PK Bupati;
- d. Tidak terdapat sasaran dan indikator yang mencerminkan kinerja "Kebudayaan" pada Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.

## **2) Pengukuran Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Selain itu, telah memiliki aplikasi e-sakip untuk melakukan monitoring kinerja pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum memiliki pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja;
- b. Aplikasi e-sakip belum dimanfaatkan dengan baik;
- c. Pengukuran kinerja organisasi belum diikuti dengan proses pembaruan target dan strategi dalam upaya memastikan pencapaian kinerja maksimal di akhir periode;
- d. Terdapat penetapan target pada PK Bupati maupun PD tahun 2023 yang berada di bawah capaian tahun 2022. Diantaranya sebagai berikut:
  - Target Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur 2023 sebesar 51,20, sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 65,02 pada level Pemda;

- Target Nilai Ekspor Bersih Perdagangan tahun 2023 sebesar 415,35, sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 736,98 pada level Pemda;
- Target Tingkat Hunian tahun 2023 sebesar 16.868, sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 21.758 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan.

### **3) Pelaporan Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 baik tingkat pemda maupun tingkat perangkat daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Sebagian besar perangkat daerah telah memiliki Laporan Kinerja yang berkualitas. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja sebagian PD belum di-upload dalam website kabupaten/ PD. Laporan kinerja pada sebagian besar PD belum memberikan analisis memadai atas faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan setiap capaian kinerja serta strategi perbaikan untuk tahun selanjutnya;
- b. Terdapat indikator kinerja Persentase Kenaikan UMK pada laporan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang target dan realisasi capaian kinerja tertulis angka "0" dan tanpa keterangan, sedangkan pada perjanjian kinerja tahun 2022 tertulis angka targetnya yang jelas. Selain itu, pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan realisasi 63,28 di tahun 2022, namun target tahun 2023 tertulis 8,68 yang sangat jauh dari capaian yang ada.

### **4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi yang disesuaikan dengan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam evaluasi internal, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD;
- b. PD belum menindaklanjuti keseluruhan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat;

- c. Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

### Solusi yang telah dilakukan

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menindaklanjuti Rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022 sehingga telah terjadi peningkatan peningkatkan akuntabilitas kinerja. Walaupun namun masih perlu disempurnakan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan suatu masukan terkait perbaikan lebih lanjut atas capaian evaluasi kinerja tersebut. Adapun hasil penilaian kinerja AKIP tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyempurnakan penjabaran kinerja mulai dari level Bupati sampai level individu sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi	Melaksanakan penyusunan pedoman SAKIP aspek perencanaan, pengumpulan dan pengukuran data kinerja, serta evaluasi internal secara komprehensif
2	Penjenjangan kinerja belum disusun untuk seluruh level organisasi dan belum sepenuhnya berdasarkan identifikasi Critical Success Factor (CSF) atas pencapaian kinerja, sehingga belum mampu menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi	Integrasi Penjabaran Kinerja melalui Cascading kedalam dokumen Perencanaan Daerah (RPD Tahun 2024-2026)
3	Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya	Telah dilakukan penyempurnaan <i>penjabaran perencanaan kinerja</i> (cascade down) dari level pemerintah daerah kepada PD hingga level individu melalui penyempurnaan <i>Pohon Kinerja Perangkat Daerah</i> yang di breakdown ke <i>Cascading Perangkat Daerah</i> .
4	Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi	Penyesuaian Indikator pada Dokumen RPD dan Renstra 2024-2026

	hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan	
5	Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi ESAKIP untuk monitoring dan evaluasi kinerja daerah dan PD, sehingga dapat memberikan informasi yang mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mengawal target kinerja daerah dan menggunakan hasil capaian kinerja [ersebut sebagai dasar dalam pemberian reward and punishment;	Melaksanakan penyusunan pedoman SAKIP aspek perencanaan, pengumpulan dan pengukuran data kinerja, serta evaluasi internal secara komprehensif
6	Memastikan bahwa terdapat pemantauan atas tindaklanjut atas rekomendasi evaluasi internal yang diberikan dan pelaksanaan pembinaan berkelanjutan pada seluruh OPD	Meningkatkan kapasitas APIP melalui pendampingan dan pelatihan sehingga meningkatkan kualitas hasil evaluasi akuntabilitas Melaksanakan SAKIP Award di lingkup Kabupaten Indragiri Hilir sebagai upaya untuk mendorong percepatan implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan /Outcome	Keterangan
1	Bagian Organisasi Setda inhil Melaksanakan Kegiatan Bimtek Penguatan Implementasi SAKIP 2023 Berdasarkan Kemenparb No 88 Tahun 2021. Tujuan	

	<p>pelaksanaan ini untuk menambah wawasan pemahaman Perangkat Daerah tentang SAKIP dan mengetahui Langkah langkah Strategis yang harus disiapkan dalam rangka Persiapan Evaluasi SAKIP TAhun 2023</p>	
2	<p>Asistensi Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP Sesuai</p>	

	<p>Sistematika Permenpan RB No 53 Tahun 2014</p>	
<p>3</p>	<p>Melaksanakan SAKIP Award di lingkup Kabupaten Indragiri Hilir sebagai upaya untuk mendorong percepatan implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah</p>	
<p>4</p>	<p>Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bersama Bupati Indragiri Hilir</p>	

<p>FGD Penyusunan Indikator Kinerja untuk Dokumen RPD dan Renstra 2024-2026</p>	
---	--

### Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Nilai LPPD Kabupaten Indragiri Hilir merupakan nilai hasil capaian atas kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak. Indikator ini diukur oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pengelompokan prestasi capaian kinerja:

- Skor  $3 < ST \leq 4$  artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST)
- Skor  $2 < T \leq 3$  artinya berprestasi Tinggi (T)
- Skor  $1 < S \leq 2$  artinya berprestasi Sedang (S)
- Skor  $0 \leq R \leq 1$  artinya berprestasi Rendah (R).

Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 berdasarkan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten dan Kota Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh Nilai sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Capaian Nilai LPPD 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	1,31 Sangat Rendah	33 %	Sangat Tinggi	Rendah 2.4218	60 %

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023

Nilai Evaluasi PPD ada tahun 2023 memperoleh 2.4218 atau status Rendah. Hal ini belum sesuai dengan Target RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yang telah diperjanjikan yakni status Sangat Tinggi sehingga Realisasi EPPD belum sesuai Target atau tidak tercapai. Jika kita kelompokkan prestasi capaian kinerja dengan point tertinggi 3- 4 (Sangat Tinggi) Capaian Realisasi dari Nilai Indikator Nilai LPPD mendapatkan Realisasi Capaian Kinerja 60%.

Perbandingan Capaian Realisasi tahun 2022 untuk Indikator Nilai Evaluasi EPPD mengalami kenaikan 1,1 %

#### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan status penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu pemantauan untuk capaian kinerja urusan pemerintahan, peningkatan kualitas penyusunan LPPD serta koordinasi dengan perangkat daerah. Untuk tahun 2023, strategi yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :

1. Melakukan koordinasi yang intensif antara Tim penyusunan LPPD Kabupaten dengan Tim LPPD perangkat daerah.
2. Melakukan pembinaan kepada perangkat daerah;
3. Percepatan pencapaian Indikator-indikator Kinerja Kunci yang menjadi evaluasi Kemendagri.

Berdasarkan Hasil keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1-131109 diperoleh Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh Nilai 1,31 dengan status sangat Rendah.

Dengan demikian target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai RPJMD yang telah disusun tahun 2018-2023 Tidak Tercapai.

1. Analisis Kegagalan itu disebabkan beberapa faktor diantaranya :  
Pengumpulan Data yang Masih Lemah
2. Kurang sosialisasi penyusunan LPPD
3. Regulasi yang belum disertai dengan pedoman penyusunan sehingga dalam menerjemahkan indikator- indikator dalam IKK LPPD kadang kurang sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri;
4. Pelaksanaan sosialisasi regulasi yang baru terbit melalui rapat virtual kurang efektif; dan
5. Banyaknya IKK baru yang berbeda dari tahun sebelumnya sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk pemenuhan data dukungannya.

#### **Opini BPK atas LKPD**

Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut “opini”. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Interen.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023 menetapkan target yaitu predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan (WTP). Pada pelaksanaannya realisasi capaian kinerja dalam pengelolaan keuangan dapat terpenuhi, hal ini ditandai dengan opini BPK terhadap status laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Dibawah ini tabel target dan realisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2023.

**Tabel 3.14**  
**Capaian Opini BPK**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Opini BPK	Prediket	WTP	WTP	100 %	WTP	AUDIT SEDANG DILAKSANAKAN	NA

*Sumber: BKAD Kab. Inhil*

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan tabel diatas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam enam tahun terakhir dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah menunjukkan grafik yang sangat baik dengan berhasil meraih pencapaian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK selama enam tahun. Pencapaian tersebut sesuai dengan target kinerja daerah yang menetapkan target 100% dalam pencapaian pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator opini wajar tanpa pengecualian dari BPK selama lima tahun.

Target IKU Opini Laporan Keuangan adalah kategori “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Sampai akhir tahun 2022, Indragiri Hilir berhasil mencapai kategori “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dengan capaian kinerja sebesar 100% , hal ini mensyaratkan Kinerja pada tahun 2022 “TERCAPAI”. Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dinilai oleh BPK telah akuntabel, wajar, dan transparan hal ini menjadi dasar BPK memberikan opini dengan kategori WTP. Untuk realisasi capaian Opini Laporan Keuangan tahun 2023 belum di publish karena masih dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/**

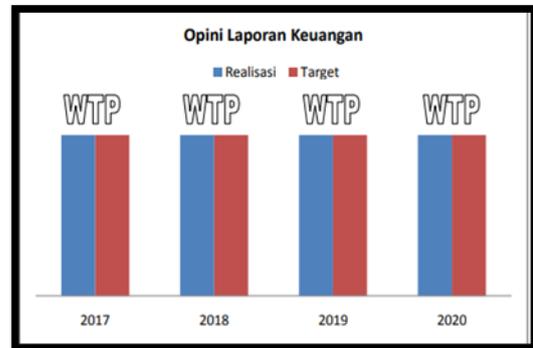
#### **Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan**

Selama Periode 2017-2022, Kabupaten Indragiri Hilir berhasil mempertahankan Opini WTP hasil pemeriksaan BPK secara berturut-turut. Capaian hasil akuntabilitas tidak terlepas dari upaya :

1. Melakukan penyesuaian berbagai regulasi pengelolaan keuangan
2. Upaya peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah

3. Adanya aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah
4. Meningkatnya peran APIP dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.

Dan menurut Opini BPK, Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir disajikan secara Wajar dalam semua hal yang material, Posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 31 Desember 2022 dan Realisasi anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lbih,



Operasional, Arus Kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Target Kinerja yang ingin dicapai pada Sasaran strategis ini adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Badan Pemeriksa Keuangan Pemeriksa Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dijadikan indikator yang akan dicapai oleh BPKAD Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021 yang diserahkan pada Tahun 2023, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian

### **Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Berdasarkan Hasil Penyelenggaraan Hasil Evaluasi SPBE dari KemenPAN RB pada tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh Nilai dengan Nilai 2.23 (Cukup).

**Tabel 3.15**  
**Capaian Opini BPK**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks SPBE	Nilai	2,09	2.13	101 %	3	2.23	74 % %

*Sumber: KemenPANRB*

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 108 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan nilai indeks 2,23 dengan predikat Cukup.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) indeks SPBE tahun 2023 adalah **3** poin, dengan Realisasi 2.23 Poin sementara pada Tahun 2022 Target Indikator Kinerja Daerah untuk Indeks SPBE Sebesar 2,09 dengan Realisasi 2,13 Capaian Kinerja 101 % terdapat selisih **0.81** poin dari target yang sudah ditentukan pada RPJMD, dan untuk Capaian Kinerja sendiri untuk tahun 2023 target indeks SPBE yaitu **3** poin realisasi 2,23 atau 77 % terdapat penurunan Capaian Kinerja sebesar 24 %

#### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/**

#### **Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan**

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Indragiri Hilir. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kab. Indragiri Hilir, sudah dapat menggambarkan

predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir adalah:

1. Pada penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya penerapan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Publik Sektor 2 (Perijinan) yang telah memenuhi kondisi terintegrasi . Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi pengaduan pelayanan publik dan perijinan ‘
2. Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Indragiri Hilir masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK, Perencanaan Strategis SPBE dan Penyelenggara SPBE. Terkait Aspek Penerapan Manajemen SPBE, semuanya masih dilakukan tanpa pedoman perencanaan dan dilakukan sewaktu-waktu. Demikian juga untuk aspek Audit TIK yang dilakukan tanpa melalui perencanaan di tahap awal sehingga tidak maksimal.
3. Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, belum tersedia dokumen arsitektur dan peta rencana yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada regulasi yang berlaku. Terkait dengan Penyelenggara SPBE, Tim Koordinasi SPBE di tingkat Pemerintah Kab. Indragiri Hilir masih berjalan tanpa adanya program kerja yang terencana.
4. Kolaborasi Penerapan SPBE juga masih dilakukan tanpa perencanaan. Hal ini menyebabkan Penyelenggara SPBE, Penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK yang dilaksanakan tidak efektif dan optimal dalam mendukung penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan.
5. Apresiasi diberikan terhadap penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kab. Indragiri Hilir terkait dengan banyaknya pemanfaatan Aplikasi Umum Berbagi Pakai untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik. Hal ini dapat meningkatkan Tingkat Kematangan, perbaikan kualitas layanan baik internal maupun Masyarakat, dan efisiensi anggaran. Pemakaian berbagai aplikasi umum/ berbagi pakai adalah pilihan terbaik dalam mewujudkan layanan secara cepat dan murah. Untuk memperbaiki tingkat kematangan dalam

penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kab. Indragiri Hilir, diperlukan upaya-upaya perbaikan yang sifatnya wajib dan mendesak untuk direncanakan dan dilaksanakan.

6. Pada Aspek Kebijakan internal diperlukan review untuk memastikan pemenuhan kelengkapan dalam pengaturan baik terkait kelengkapan unsur maupun cakupan organisasi.
7. Pemerintah Kab. Indragiri Hilir harus segera menyusun dokumen arsitektur dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan ketentuan terbaru. Setelah dokumen ini disusun, hendaknya semua aspek penerapan SPBE mengacu kepada dokumen Arsitektur dan Peta Rencana sehingga akan terjadi kolaborasi dalam penyelenggaraan SPBE.
8. Aspek Layanan yang telah berjalan dengan baik, hendaknya mulai ditingkatkan dengan pemakaian sistem berbagi pakai maupun melakukan peningkatan kapasitas teknis aplikasi mulai dari pengembangan fitur transaksi, validasi, proses review dan penyempurnaan terhadap layanan yang telah ada sehingga tingkat kematangannya akan semakin maksimal.
9. Aspek lainnya yang cukup penting adalah melakukan berbagai upaya terkait penerapan manajemen perubahan agar penyelenggaraann SPBE di Pemerintah Kab. Indragiri Hilir dapat dilakukan secara lebih bersama-sama dan melibatkan sinergi dari seluruh komponen perangkat daerah di bawah koordinasi Tim Koordinasi SPBE.

## **Indeks Inovasi Daerah**

Inovasi merupakan kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Dari realisasi kinerja dan keuangan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023, dilakukan akselerasi melalui beberapa inovasi pada tahun 2023 dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang berhubungan dengan pelayanan langsung masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan sumberdaya yang tersedia, pelayanan masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas (a) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (b) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

**Tabel 3.16**  
**Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022**

Skor	Kategori
60,01 – 100,00	Sangat Inovatif
35,00 – 60,00	Inovatif
0,00 – 34,	Kurang Inovatif
0	Tidak Dapat Dinilai

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10-11-6287 tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, Kabupaten Indragiri Hilir mendapat Nilai sebagai berikut :

**Tabel 3.17**  
**Capaian Indeks Inovasi Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (75,98)	100 %	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (63,72)	100 %

Sumber: Kemendagri No. 400.10-11-6287 tahun 2023

Indikator kinerja Inovasi Daerah tahun 2023 umumnya menunjukkan Capaian Realisasi sangat inovatif. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kembali berhasil masuk Prediket sangat inovatif dengan Nilai 63,72 pada Peringkat 21 dalam Indeks daerah yang sangat inovatif. Dari 415 Kabupaten yang terdata pada indeks inovasi daerah, Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai Kabupaten yang sangat inovatif dengan nomor urut 21 dari 41 Kabupaten yang masuk dalam kategori Kabupaten sangat inovatif. Jika diperbandingkan Pada Tahun 2022 Terjadi Penurunan Capaian Nilai sebesar 12,26 % tetapi pada Realisasi masih dalam kategori Sangat Inovatif.

## **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan**

Pada tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir melalui Bidang Litbang telah mengirimkan 84 inovasi dari 54 organisasi Perangkat daerah termasuk Kecamatan dan Rumah Sakit Daerah. Adapun inovasi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. Inovasi “Si Kelapa Muda” (Konsultasi Online Keputusan Kepala Daerah Pasti Mudah Dan Aman) Produk Inovasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Inovasi Portal Csr (Corporate Sosial Responsibility) Kabupaten Indragiri Hilir Produk Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
3. Inovasi Layanan Kopi Terintegrasi (Konsultasi Online Pengawasan Intern Terintegrasi) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
4. Inovasi Sigala (Sistem Informasi Kenaikan Gaji Berkala) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir
5. Stem Informasi Kenaikan Pangkat) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir
6. Aplikasi Simona V.2 (Sistem Informasi Monitoring Lapangan Versi 2) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
7. Inovasi Si Cabe Merah (Sistem Informasi Capaian Kinerja Berkala Menuju Manajemen Efektif Dan Terarah) Produk Inovasi Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
8. Novasi Juklak Perkada Terintegrasi (Pengajuan Dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah Terintegrasi) Produk Inovasi Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
9. Inovasi Podcast Kepegawaian Produk Inovasi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir
10. Inovasi Aplikasi Sidayang (Aplikasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang) Produk Inovasi Badan Perencanaan Pembanguann Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
11. Inovasi E-Kinerja Produk Inovasi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir
12. Inovasi Si Teking (Sistem Informasi Trace And Tracking) Produk Inovasi Pada

Badan Keuangan Dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

13. Inovasi Si Teking (Sistem Informasi Trace And Tracking) Produk Inovasi Pada Badan Keuangan Dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
14. Inovasi Si Cepat Hebat (Sitematis, Cepat, Hemat Dan Bermartabat) Sebagai Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022
15. Inovasi Pendekar Umkm (Pengembangan Desa Kolam Renang Dan Gerai Umkm) Produk Inovasi Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
16. Inovasi Pemenang (Pengembangan Nanas Gemilang) Produk Inovasi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
17. Inovasi Geber Metik Nuja Annafi (Gerakan Bersama Membatik Nuja Annafi ) Produk Inovasi Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
18. Inovasi Pasma Mandah (Pasar Swadaya Masyarakat Mandah) Produk Inovasi Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
19. Inovasi Pembuatan Produk Vco (Virgin Coconut Oil) Produk Inovasi Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
20. Inovasi Saprading (Pengembangan Sapi Perah Dan Pedaging) Produk Inovasi Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
21. Inovasi Ketan Beras (Kerajinan Tangan Berbahan Resam) Produk Inovasi Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
22. Inovasi Gsu-Gerakan Saddakah Umma (Gerakan Setetes Darah Dari Kecamatan Tanah Merah Untuk Keselamatan Umat Manusia) Produk Inovasi Upt. Puskesmas Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir
23. Novasi Yuni Oliga (Yuk Nikmati Olahan Ikan Gabus) Produk Inovasi Desa Mugomulyo Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir
24. Inovasi Terapi (Perternakan Sapi) Produk Inovasi Desa Kelapa Patih Jaya Kecamatan Teluk Belengkong
25. Inovasi Gerah Tian Hari Ni (Gerakan Cegah Stunting Dengan Olahan Protein Hewani) Produk Inovasi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir
26. Inovasi "Tenggiri" (Teknologi Pengilingan Ikan Ruca Inhil) Produk Inovasi Lainnya Pada Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir
27. Inovasi "Es Pro Pepeng Makan Besar Ikan" (Edukasi Proses Pengawetan Dan

- Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Ikan)” Produk Inovasi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir
28. Inovasi Pesud (Pelindung Sungai Dalam Anak Batang) Produk Inovasi Kecamatan Kuala Indragiri Kabuapten Indragiri Hilir
  29. Inovasi Pelasah (Pengolah Lahan Sawah ) Produk Inovasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir
  30. Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten Indragiri Hilir (Si Nana Inhil) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
  31. Inovasi Teman Sehati Terintegrasi (Kecamatan Tanah Merah Menjemput Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir Terintegrasi) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir
  32. Inovasi Rumah Si Mas Appe (Rumah Singgah Masyarakat Dan Aparat Pemerintah) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Enok
  33. Inovasi Pantas Adek Tahu (Papan Transparansi Online Informasi Aset Desa Kecamatan Tembilahan Hulu) Inovasi Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir
  34. Inovasi “Rupiah Gizi” (Rumah Pemulihan Gizi) Produk Inovasi Upt. Puskesmas Gajah Mada Tembilahan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
  35. Inovasi Bungasnya Pembantu (Gubuk Naung Dan Rumah Singgah Nyaman Kecamatan Batang Tuaka) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir
  36. Inovasi Besung Mi-Seraga ( Bebas Pasung Membangun Insan Sehat Jiwa Dan Raga) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir
  37. Inovasi Pesta Padi (Perubahan Status Tanpa Di Urus) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir
  38. Inovasi “Si Punak” (Aplikasi Pengaduan Kekerasan Perempuan Dan Anak) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berekana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir
  39. Inovasi Tajuk Reteh (Data Jaringan Penduduk Kecamatan Reteh) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
  40. Inovasi Pejantan (Pelayanan Jemput Antar Dokumen Pertanahan) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir

41. Inovasi Dm Dan Ht Center Bagi Pasien Diabetes Melitus Dan Hipertensi Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Upt. Puskesmas Kuala Enok Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
42. Inovasi Sorum (Sistem Informasi Transportasi Umum) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir
43. Inovasi Teaterikel (Tempat Kreatif Kaum Difabel) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir
44. Penelusuran, Pembinaan Dan Pelatihan Kepada Suku Duano Dalam Penerimaan Calon Anggota Polri Produk Inovasi Pelayanan Publik Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir
45. Inovasi Si Pelangi Pagi Terintegrasi (Sistem Pelayanan Dan Layanan Administrasi Pelangiran Penggunaan Aktif Teknologi Terintegrasi) Produk Inovasi Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir
46. Inovasi Istaka (Inhil Satu Data Merdeka) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
47. Inovasi Temu Klien (Tempat Komunikasi Keluarga Pasien) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir
48. Novasi E-Humor (Edukasi Dan Himbauan Untuk Masyarakat Penderita Tumor) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir.
49. Inovasi Satgas Dan Aplikasi P2ab (Percepatan Pelayanan Air Bersih) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
50. Inovasi "Trc Map Gas" (Tim Rekasi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) Produk Inovasi Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir
51. Klinik Kopukm (Klink Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah) Produk Inovasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir
52. Si Pondok Indah (Sistem Pengajuan Online Dokumen Pembangunan Rumah Ibadah) Produk Inovasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir
53. Inovasi Pejabat (Perpustakaan Jendela Terhebat) Produk Inovasi Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

54. Inovasi Sibapokting (Sistem Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir
55. Inovasi Aplikasi Damkar Siap (Dedikasi, Andal, Manusiawi, Kreatif, Antisipatif, Ramah, Syukur, Ikhlas, Amanah, Profesional) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir
56. Inovasi Si Mantap Versi 2.0 (Sistem Informasi Manajemen Tata Pengaduan Versi 2.0) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rsud Raja Musa Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir
57. Inovasi Siduan Laper (Sistem Pengaduan Layanan Perbatasan Indragiri Hilir) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Bagian Kerja Sama Dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
58. Inovasi Sapa (Sahabat Bahasa Pasien) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rsud Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
59. Inovasi Ayo Ceting Deting (Ayo Cegah Stunting Dengan Parenting) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir
60. Inovasi Seteko (Senam Diabetes Terkontrol) Produk Inovasi Pada Rsud Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
61. Inovasi Kecap Manis (Edukasi Pelayanan Calon Pengantin, Mandiri Dan Harmonis) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Upt. Puskesmas Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir
62. Inovasi Kelapa Muda Terintegrasi (Komunikasi Elektronik Pelayanan Prima, Mudah Dan Akurat Terintegrasi) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir
63. Inovasi Si Petrok (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Elektronik) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir
64. Inovasi Kedai Puspaga (Konseling, Edukasi Dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga) Produk Inovasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir
65. Inovasi Korsi Panas Terintegrasi (Kontak Informasi Pelayanan Akuntabel Dan Sistematis Terintegrasi) Produk Inovasi Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
66. Inovasi Si Pengadu Bantal (Sistem Informasi Dan Pengaduan Bantuan Sosial

Pkh Kabupaten Indragiri Hilir) Produk Inovasi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

67. Inovasi Kolak Pisang (Klinik Observasi Layanan Konsultasi Pengurusan Izin Usaha Angkutan) Produk Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir
68. Inovasi Rkp (Relawan Kami Peduli) Produk Inovasi Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
69. Inovasi Simpati (Sistem Monitoring Pengelolaan Tender/Seleksi Indragiri Hilir) Produk Inovasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
70. Inovasi Aplikasi Sahabat (Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu) Produk Inovasi Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
71. Inovasi Siap Pak Rt (Sistem Informasi Adminstrasi Pelayanan Praktis, Ringkas, Dan Cepat) Produk Inovasi Kelurahan Madani Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
72. Aplikasi Kami (Kolom Aspirasi Masyarakat Indragiri Hilir) Sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Indragiri Hilir
73. Inovasi Kliping (Klinik Pelaporan Investasi Keliling) Produk Inovasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kabupaten Indragiri Hilir
74. Novasi Panatik (Pelayanan Surat Tanah Dengan Titik Koordinat) Produk Inovasi Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir
75. Inovasi Sipetus Bergerak (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Produk Inovasi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
76. Inovasi Peras Santan (Percepatan Penyelesaian Tanah Masyarakat Dalam Kawasan Hutan) Produk Inovasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
77. Inovasi Sistem Informasi Harga Komoditas Perkebunan (Si Gadis Perkebunan) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir
78. Inovasi Kuini Segar (Kelompok Usia Dini Sehat Edukatif Bergerak Akif Dan Kreatif) Produk Inovasi Pelayanan Publik Upt Puskesmas Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir
79. Inovasi Mobile Timpas (Tim Patroli Sampah) Produk Inovasi Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir
80. Inovasi Simpol Tali (Sistem Informasi Dan Pelaporan Trantibum Linmas) Produk

## Inovasi Satpol Pp Kabupate

81. Inovasi Digitmark (Digital Marketing) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Indragiri Hilir
82. Inovasi Sipirang “Sistem Informasi Pelaporan Dan Pelayanan Orang Tua Asuh Gelandangan” Produk Inovasi Pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir
83. Tim “Penagihan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan (Tim Pinang Pandan)”. Produk Inovasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
84. Antisipasi Tindakan Satwa Liar (Tas Tiara) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Indeks Inovasi Daerah disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

### **Faktor pendukung :**

1. Berkembangnya inovasi teknologi tepat guna di masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir
2. Bertambahnya inovator - inovator inovasi teknologi tepat guna di Kabupaten Indragiri Hilir
3. Jumlah Inovasi Daerah yang di kirim ke Kementerian Dalam Negeri
4. Video Inovasi yang menggambarkan keselarasan dari produk Inovasi Perangkat Daerah
5. Kelengkapan berkas pendukung Inovasi Daerah
6. Waktu pelaporan yang lebih awal ke Kementerian Dalam Negeri

### **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Nilai IKM diperoleh dengan dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Pelayanan Publik yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Ada 9 unsur pelayanan yang diukur dalam pelaksanaan Survey kepuasan Masyarakat yaitu :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

**Tabel 3.18**  
**Nilai Persepsi IKM**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,533	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

**Tabel 3.19**  
**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)
			Realisasi	Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84.31	89.22	84.89	95%

(sumber : Data Olahan Bagian Organisasi)

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2023 dilakukan terhadap 13 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terdiri atas 5 (Lima Perangkat Daerah), 2 (dua) RSUD, 1 Kecamatan, dan 4 (empat) Puskesmas. Dari data di atas dapat dilihat, bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 84,89 terdapat kenaikan sebesar 0.58 dari realisasi 2022, dengan klasifikasi Mutu Pelayanan B dengan kategori Kinerja Unit Layanan BAIK. Capaian kinerja ini lebih rendah dari target capaian 2023 yang

ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 89.22 dengan demikian capaian kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat hanya sebesar 95%.

### **Analisis keberhasilan/kegagalan**

Pada Tahun 2022 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 8 (delapan) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdiri atas 4 (empat) perangkat daerah, 1 (satu) RSUD dan 3 (tiga) Puskesmas. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat Penambahan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat yakni sebanyak 13 (tiga belas) UPP. Terdapat beberapa Unit Pelayanan Publik yang masih rendah dalam unsur penilaian antara lain pada unsur penanganan pengaduan, kecepatan waktu pelayanan, kompetensi/kemampuan petugas pelayanan dan Persyaratan Pelayanan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan antara lain perlu adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan dilingkungan pemerintah kabuapten Indragiri Hilir pada waktu yang akan datang bisa lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Unit penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikan rencana tindak lanjut terkait Survey kepuasan masyarakat terhadap penilaian pada unsur yang masih rendah untuk dilakukan perbaikan serta optimalisasi penerapan standar pelayanan pada setiap unit pelayanan publik dan perlunya pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang berkelanjutan yang dilakukan baik secara manual maupun secara elektronik.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-1 dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

**Tabel 3.20 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-1**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	penyelenggaraan	79,00	71,79	91%	Rp.51.349.600	Rp.49.652.375	96,69%	-13,17%
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	BB	B	90%	Rp.245.446.500	Rp.230.749.487	94,01%	
3			Sangat Tinggi	Rendah	60%	Rp.1.282.130.299	Rp.920.567.466	73,47%	
4			WTP	N/A	N/A	Rp.3.604.948.569	Rp.3.086.999.277	89,75%	
5			3,00	2,23	70%	Rp.23.461.174.508	Rp.21.984.847.959	93,71%	
6			Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%	Rp.1.001.737.760	Rp.668.864.720	66,77%	
7		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	89,22	84,89	95%	Rp.178.670.750	Rp.175.579.856	98,27%	

Dari tabel di atas dapat dilihat, penggunaan sumber daya pada Misi Ke-1 **Tidak Efisien**. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang bernilai -13,17%. Pada misi ke-1, terdapat 7 (tujuh) indikator yang seyogyanya menjadi masukan dalam formulasi. Namun, dikarenakan adanya 1 (satu) indikator yang tidak atau belum memiliki nilai capaian, yakni Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Maka, indikator kinerja ini mesti dikeluarkan dalam formulasi penghitungan agar hasil penghitungan dapat proporsional.

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-1 dilakukan melalui 6 (enam) indikator yakni:

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Nilai AKIP
3. Nilai LPPD
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Indeks Inovasi Daerah
6. Indeks Kepuasan Masyarakat

### Sasaran Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Tujuan Ke-2 pada capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar, dengan 3 sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Permukiman, Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Meningkatnya Pelayanan Transportasi. Tujuan ke-2, diukur dengan 5 (Lima) indikator yaitu Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Bersih, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak, Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Cakupan sarana dan prasarana angkutan.

**Tabel 3.21**  
**Capaian Peningkatan Kualitas Infrastruktur**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase	59,5%	50,42%	84,74%	51,20%	68,98%	135 %

2.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Air Bersih	Persentase	48 %	26.69	56 %	52 %	26,51 %	51 %
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Persentase	65	60,81	93,55%	70	54.91	78.44
4.	Persentase Penyediaan Infrastruktur	Persentase	59,50	50,42	87,74	60	56,08	93%
5	Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan	Persentase	73.80%	75,91%	102,8%	73,80%	65,71%	89,03%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					84,97%			89,29%

### **Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar**

Secara umum dilihat dari jenisnya, jalan di kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Dilihat dari jenis permukaannya, terdiri dari permukaan aspal, kerikil, tanah dan cor beton. Sedangkan dilihat dari kondisinya dikelompokkan ke dalam kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat.

Panjang jalan kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 adalah 1.190,594 Km, dengan jenis dan kondisinya bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.22**  
**Panjang dan kondisi jalan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023**

Panjang (Km)	Bahan Perkerasan					Kondisi (Km)		
	Hot mix	Aspal/Penetrasi/Maqadam	Beton	Telford/kerikil	Tanah/belum Tembus	Baik	Sedang	Rusak
1.190,594	58,146	65,633	320.806	537,981	208,028	597,878	254,962	279,648

Sumber : Bappeda Inhil

Sedangkan jumlah dan kondisi jembatan yang ada di kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.23**  
**Jumlah, Panjang dan kondisi jembatan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023**

Jumlah Jembatan	680 Unit
Panjang jembatan	17.125,3 meter
NK 1	282 unit
NK 2	88 unit
NK 3	127 unit
NK 4	168 unit
NK 5	15 unit

Sumber : Bappeda Inhil

Adapun capaian kinerja dari indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.24**  
**Indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan persentase jalan dalam kondisi baik**

No	Indikator Kinerja	2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase jalan dalam kondisi baik	56	56	73,64	73
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	62,32	44,85	64,32	64
	Rata rata capaian		50,42		68,98

Sumber : LkjIP Dinas PU Kab. Inhil Tahun 2023

Realisasi Persentase penyediaan infrastruktur pada tahun 2023 adalah sebesar 68,98%, dari yang ditargetkan sebesar 51,20%, yang berarti tercapai sebesar 135 %

**Tabel 3.25**  
**Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	Persentase	59,5 %	50,42 %	84,74 %	51,20 %	68,98 %	135 %

## Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Bersih

Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri atas air kemasan, air isi ulang, leding dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat  $\geq$  10 m].

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak Tahun 2023 dapat dilihat dari Tabel Berikut :

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sumber Air Minum Bersih Source of Clean Drinking Water	Akses Air Minum Layak Access of Decent Drinking Water
(1)	(2)	(3)
Kuantan Singingi	71,06	83,02
Indragiri Hulu	83,66	73,31
Indragiri Hilir	26,88	90,27
Pelalawan	86,37	82,81
Siak	90,10	93,76
Kampar	75,33	94,18
Rokan Hulu	84,30	90,75
Bengkalis	63,12	95,64
Rokan Hilir	62,72	86,56
Kepulauan Meranti	10,42	93,37
Pekanbaru	92,17	99,17
Dumai	86,90	89,81
<b>Riau</b>	<b>72,70</b>	<b>90,47</b>

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonoimi Nasional (Susenas) Maret/BPS-Statistics Indonesia, The March National Socio-Economic Survey (Susenas)

Sumber: BPS

**Tabel 3.26**  
**Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga yang memiliki Air Bersih**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Air Bersih	Persentase	48 %	26.69	56 %	52 %	26,51 %	51 %
	Sumber	Dinas PUPR Kab. Inhil dan Bappeda Kab. Inhil						

Di Indragiri Hilir, Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten / kota selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus meningkat, namun tidak signifikan. Capaian Indikator Persentase Rumah tangga yang memiliki Air Bersih pada 2022 sebesar 26.69 persen dan pada tahun 2023 sebesar 26, 51 % dengan capaian 51 %

Penyebab Rendahnya capaian ini adalah Belum meratanya penyebaran SPAM dan jaringan perpipaan pada satuan permukiman di Kabupaten Indragiri Hilir serta kinerja PDAM yang dalam kondisi salit. Hal ini hendaknya agar menjadi fokus pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

### **Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak**

Sanitasi merupakan pertumbuhan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi termasuk di dalamnya beberapa prasarana antara lain sistem pengelolaan air limbah (termasuk instalasi pengolahan air limbah), sistem pengelolaan sampah, sistem drainase atau disebut pengolahan limpahan air hujan. Akses sanitasi layak merupakan salah satu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan bagi seluruh masyarakat ataupun rumah tangga, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. Akan tetapi akses sanitasi layak tidak akan terwujud sesuai standar kesehatan apabila drainase belum tertata dengan rapi.

**Tabel 3.27**

#### **Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layanan Sanitasi Layak**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Tahun 2023		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	65	60,81	93,55%	70	54.91	78.44

Bedasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi terhadap sanitasi layak pada tahun 2022 dengan ralisasinya sebesar 60,81% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 60%. Ini dapat diartikan bahwa setiap rumah tangga sudah memahami atau sadar akan pentingnya memiliki sanitasi yang layak bagi kesehatan keluarga dan lingkungan mereka agar terhindari dari berbagai macam penyakit dikemudian harinya.

Jika ditinjau dari sudut kesehatan, pembuangan kotoran manusia yang tidak memenuhi standar sanitasi akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Berdasarkan data Susenas, sekitar 71,01 persen rumah tangga menggunakan jenis kloset leher angsa dan sebanyak 63,81 persen yang memiliki jarak sumber air minum dengan penampungan tinja terbanyak berjarak >10 m.

**Tabel 3.28**  
**Persentase Fasilitas Tempat Buang Air di Kabupaten Indragiri Hilir**

Karakteristik	Fasilitas Tempat Buang Air Besar		Jumlah
	Sendiri	Lainnya	
Kelompok Pengeluaran			
40% Terbawah	74,83	25,17	100
40% Tengah	86,93	13,07	100
20% Teratas	90,58	9,42	100
<b>Indragiri Hilir</b>	<b>83,82</b>	<b>16,18</b>	<b>100</b>

Adapun berdasarkan tempat pembuangan akhir tinja, hanya 39,81% rumah tangga yang telah memiliki fasilitas pembuangan tinja seperti tangki septik, IPAL, atau SPAL. Sedangkan terdapat 60,19% sisanya adalah masyarakat yang tidak memiliki fasilitas tersebut.

**Tabel 3.29**  
**Persentase Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Indragiri Hilir**

Karakteristik	Tempat Pembuangan Akhir Tinja		Jumlah
	Tangki Septik/IPAL/SPAL	Lainnya	
Kelompok Pengeluaran			
40% Terbawah	36,86	63,14	100
40% Tengah	35,31	64,69	100
20% Teratas	49,95	50,05	100
<b>Indragiri Hilir</b>	<b>39,81</b>	<b>60,19</b>	<b>100</b>

Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupten Indragiri Hilir pada tahun 2023 telah melakukan berbagai macam strategi dalam penataan sanitasi yang layak bagi setiap rumah tangga diantaranya menciptakan permintaan sanitasi dan perubahan perilaku kebersihan untuk meningkatkan kesadaran dan prioritas untuk memiliki fasilitas sanitasi yang layak dengan menjelaskan resiko kesehatan yang akan dihadapi masyarakat akibat dari buruknya sanitasi. Berdasarkan penelitian formatif, penciptaan permintaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menggunakan strategi komukisai massal, komunikasi interpersonal/kelompok dengan sasaran rumah tangga, bisnis, lembaga dan sekolah dilingkungan perkotaan dan permukiman.

### **Persentase Penyediaan Infrastruktur**

Secara umum dilihat dari jenisnya, jalan dikabupaten indragiri hilir terdiri atas jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten. Dilihat dari jenis permukaannya, terdiri dari permukaan aspal, kerikil, tanah dan cor beton. Sedangkan dilihat dari kondisi jalannya dikelompokkan kedalam kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Panjang jalan kabupaten indragiri hilir pada tahun 2023 adalah 1.190,594 Km, dengan jenis dan kondisinya bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.30**  
**kondiri jalan di Kabupaten Indragiri Hilir**

Panjang (Km)	Bahan Perkerasan			Kondisi (Km)		
	Aspal	Beton	Tanah dan kerikil	Baik	Sedang	Rusak
1.190,594	122,45	517,23	550,90	69.046	598.685	522.863

*Sumber : Inhil Dalam Angka 2024*

Jika dilihat dari kondisi jalan kabupaten tahun 2023 terdapat 5,80 persen dalam kondisi baik, 50,28 persen kondisi sedang, 16,40 persen kondisi rusak dan sisanya 27,52 persen kondisi rusak berat. Dan apabila dilihat dari jenis permukaan jalan kabupaten, pada tahun 2023 terdapat 10,29 persen (122,45 km) adalah aspal, 43,44 persen (517,23 km) adalah tidak diaspal (Beton/Rigid), dan 46,27 persen (550,90 km) tanah dan kerikil.

Secara umum dilihat dari jenisnya, jalan dikabupaten indragiri hilir terdiri atas jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten. Dilihat dari jenis permukaannya, terdiri dari permukaan aspal, kerikil, tanah dan cor beton. Sedangkan dilihat dari

kondiri jalannya dikelompokkan kedalam kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Panjang jalan kabupaten indragiri hilir pada tahun 2022 adalah 1.190,594 Km.

Realisasi Persentase penyediaan infrastruktur pada tahun 2023 adalah sebesar 50,42%, dari yang ditargetkan sebesar 59,5%, dengan capaian sebesar 84,74%.

**Tabel 3.31**  
**Capaian Penyediaan Infrastruktur**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	Capaian Penyediaan Infrastruktur	%	59,50	50,42	87,74	60	56,08	93%

Sumber: Dinas PUPR 2024

Berdasarkan data capaian tahun 2023, realisasi infrastruktur sebesar 56,08% dengan capaian 93%. Dibandingkan tahun 2022, realisasi mengalami kenaikan sebesar sekitar 6%

### **Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan**

Transportasi merupakan kebutuhan utama dalam setiap aktivitas seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kondisi alam Kabupaten Indragiri Hilir yang sebagian besar terdiri daerah perairan dan berada di pesisir, menyebabkan masyarakat masih sangat bergantung dengan transportasi air untuk menghubungkan kecamatan, antar desa maupun antar dusun. Sarana angkutan air yang paling banyak digunakan masyarakat adalah Speed Boat, dan Perahu.

Selain angkutan air, jalan sebagai sarana angkutan darat juga merupakan sarana transportasi yang sangat penting, baik sarana dalam kota maupun sarana yang menghubungkan antar wilayah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir maupun daerah yang berada di luar kota yang ada di Propinsi Riau maupun daerah tetangga lainnya

Meningkatnya kualitas pelayanan pada transportasi publik diharapkan dapat menarik minat masyarakat beralih menggunakan transportasi ini, untuk itu pemerintah kabupaten indragiri hilir menargetkan peningkatan penggunaan transportasi umum melalui terminal, pelabuhan dan bandara.

Menurut Petunjuk Teknis LLAJ tahun 1995, Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan

penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Dermaga/pelabuhan adalah tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Bandar udara atau bandar udara menurut UU no.1 tahun 2009 tentang Penerbangan, bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah masyarakat yang menggunakan moda transportasi melalui terminal, pelabuhan dan bandar udara :

**Tabel 3.32**  
**Jumlah Masyarakat Pengguna Dermaga/Pelabuhan**

Tahun	Jumlah	
	Penumpang	Angkutan Laut
2021	285.040	112
2022	315.764	112

Dari data diatas terlihat kenaikan jumlah penumpang pelabuhan pada tahun 2022 sebesar 30.724 orang, atau sebesar 9,73 persen.

Sedangkan data penumpang terminal dan bandara tidak tersedia, karena terminal tidak berfungsi, dan aktifitas penerbangan sejak tahun 2022 sudah tidak aktif lagi.

**Tabel 3.33**  
**Jumlah Masyarakat Pengguna Terminal**

Tahun	Jumlah	
	Penumpang	Angkutan Darat
2021	TERMINAL TIDAK FUNGSIONAL	
2022		
2023		

**Tabel 3.34**  
**Jumlah masyarakat pengguna bandar udara**

Tahun	Jumlah	
	Penumpang	Angkutan Udara
2021	148	1

2022	Aktifitas Penerbangan Tahun 2022 Sudah Tidak Aktif Lagi
2023	Aktifitas Penerbangan Tahun 2022 Sudah Tidak Aktif Lagi

Di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah membangun 11 dermaga baru, sehingga jumlah sehingga mendukung penambahan ketersediaan jumlah angkutan yang tersedia sampai dengan tahun 2023 sebanyak 142, dari target yang telah di ditentukan sebanyak 230 sarana dan prasana.

**Tabel 3.35**  
**Capaian Indikator Sarana dan Prasarana Angkuta Tahun 2023**

Indikator	Satuan	Penjelasan / Formulasi	Realisasi
Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan	Persen	$\frac{142}{230} \times 100\%$	61,74 %

Sumber : LkjlP Dishuh Kab.Inhil 2023

**Tabel 3.36**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Sarana dan Prasarana Transportasi Berkualitas Dinas Perhubungan Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1 Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan	73.80%	75,91%	102,8%%	73,80%	65,71%	89,03%
<b>Bobot</b>			102,8%			71,06%

Penjelasan :

Dalam menentukan cakupan sarana dan prasarana angkutan yang ada dalam Indikator adalah dari data jumlah dermaga yang dibangun, yakni 11 Pembangunan Dermaga di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Yang mana tahun 2023 target 73.80% dengan realisasi 65,71% dengan capaian 89,03.8%.

## Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-2 dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

**Tabel 3.37**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-2**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Dasar	Kualitas Infrastruktur	51,20%	68,98%	135%	Rp.2.569.736.000	Rp.2.534.572.901,71	91,81%	25,45% (20%)
2		Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur pemukiman	52%	26,51%	50,98%	Rp.7.561.360.800	Rp.6.711.418.235	88,76%	
3			70%	54,91%	78,44%	Rp.118.760.000	Rp.40.836.000	34,39%	
4		Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	60%	56,08%	93,47%	Rp.169.226.793.350	Rp.113.757.980.522,78	67,22%	
5		Meningkatnya pelayanan transportasi	73,80%	65,71%	89%	Rp.1.211.466.000	Rp.1.203.381.330	99,33%	

Dari tabel di atas dapat dilihat, penggunaan sumber daya pada Misi Ke-2 telah **Efisien**. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang menyentuh nilai maksimum 20%. Pada misi ke-2, terdapat 5 (lima) indikator yang menjadi masukan dalam formulasi.

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-2 dilakukan melalui 5 (lima) indikator yakni:

1. Persentase Penyediaan Infrastruktur
2. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki air bersih
3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
4. Persentase Penyediaan Infrastruktur
5. Cakupan sarana dan prasarana angkutan

**Tabel 3.38**  
**Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Persenta se Capaian	Capaian Tahun Sebelumn ya		Target Akhir Tahun 2023 (Berdasarkan RPJMD/RENST RA OPD)		Capaian Standar Provinsi/Nasi onal		
			4	5	6	7		8	9	10	11			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>													
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>92,47</b>	<b>Perse</b>	<b>65,71</b>	<b>Perse</b>	<b>71,07</b>	<b>70</b>	<b>Perse</b>	<b>92,47</b>	<b>Perse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

		<b>Perhubun gan</b>											
1	<b>Pembang unan, Penerbita n Izin Pembang unan dan Pengoper asian Pelabuha n Pengump an Lokal</b>	<b>Persentas e Ketersedi aan Pelabuhan Pengump an Lokal</b>	<b>80</b>	<b>Perse n</b>	<b>65,71</b>	<b>Perse n</b>	<b>82,14</b>	<b>7 0</b>	<b>Perse n</b>	<b>80</b>	<b>Perse n</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Fasilitasi Pemenuha n Persyarata n Perizinan Pembangu	Jumlah Dokumen Pemenuha n Persyarata n Perizinan Pembangu	50	Dokum en	-	Dokum en	-	0	Dokum en	50	Dokum en	-	-

	nan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	nan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal											
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	35	Unit	23	Unit	65,71	1 1	Unit	35	Unit	-	-

**Tabel 3.39**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Pelayanan Transfortasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.**

NO	VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR	PERMASALAHAN PELAYANAN		FAKTOR YANG MEMPENGARUHI			
				PENGHAMBAT		PENDORONG	
2	Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah	2.1	Pembangunan infrastruktur daerah yang belum merata	2.1.1	Belum terpetanya pembangunan infrastruktur	2.1.1	Pemetaan pembangunan infrastruktur

					daerah yang maksimal		daerah yang maksimal
		2.2	Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	2.2.1	Belum terpenuhi kebutuhan dan kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	2.2.1	Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi

		2.3	Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	2.3.1	Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat.	2.3.1	Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat, perairan dan udara
		2.4	Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat guna mendorong pengembangan konektivitas antar	2.5.1	Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat.	2.5.1	Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat, perairan

			wilayah				dan udara
		3.1	Optimalisasi operasional dan perusahaan pelabuhan Parit 21	3.2.1	Pembatasan kewenangan penyelenggaraan pelabuhan Parit 21	3.2.1	Pemahaman dan pengalihan kewenangan berdasarkan Pemerintahan Daerah

### Tujuan ke-3.1

#### Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam

#### Sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian

Sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian. Tujuan ke-3.1, diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, baik di tingkat wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga perubahan PDRB yang terjadi ditingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya.

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Keadaan ekonomi suatu daerah dapat terlihat dari PDRB daerah tersebut. PDRB dapat mencerminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah. Gambaran perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Nilai nominal PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dapat dikelola oleh suatu daerah atau dengan kata lain seberapa besar nilai tambah/jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dapat dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Capaian kinerja laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Tahun 2022 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.40**  
**Capaian Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	48,56	46,25	95 %	49,61	46,67	94%

n Terhadap PDRB								
Rata-Rata Capaian Kinerja				95 %	Sumber : BPS Kab.Inhil			94%

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tahun 2023 target capaian kinerja 49,61 %, realisasinya Tercapai 46,67 % dengan capaian 94 %.

### Tujuan 3.2 Meningkatkan Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. diukur dengan 4 (Empat) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

**Tabel 3.41**  
**Capaian Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,12	63.31	101.42	67.66	58.13	85.91
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93.50	89.85	97.35	90.61	85,34	94.18
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	60.32	43.68	72.41	53.78	35.10	65,27
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	48.32	47.91	99.15	49.05	47,38	96.60
Rata-rata Capaian Kinerja					92.58 %			85.49 %

### Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana terdapat pada Pasal 13 Ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan rumus terbaru tentang perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dilihat melalui perhitungan sebagai berikut :

Diketahui IKA= 35,10 IKU= 85,34 IKL= 47,38

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= (0,376 \times 35,10) + (0,405 \times 85,34) + (0,219 \times 47,38) \\ &= (13,20) + (34,56) + (10,38) \\ &= \mathbf{58,13} \end{aligned}$$

Tabel Predikat Penilaian IKLH

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat Baik	IKLH > 80
2	Baik	70 < IKLH ≤ 80
3	Cukup Baik	60 < IKLH ≤ 70
4	Kurang Baik	50 ≤ IKLH ≤ 60
5	Sangat Kurang Baik	40 ≤ IKLH > 50
6	Waspada	30 ≤ IKLH > 40

Sumber: IKLH 2018, Kemeterian Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada Skala Nilai Peringkat Kinerja aplikasi yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dengan Demikian IKLH untuk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 dikategorikan

**“KURANG BAIK”**

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan Indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.42**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DLHK**  
**TA. 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	(%) Capaian	Target	Realisasi	(%) Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,12	63.31	101.42	67.66	58.13	85.91

Sumber : LKJiP DLHK tahun 2023

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67.66 dengan realisasi sebesar 58.13 atau tercapai sebesar 85.91% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 15,51% dibandingkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 63.31 dengan capain kineja 101.42%. Hal ini juga terjadi karena adanya perubahan cara perhitungan IKLH pada tahun 2021 dan perubahan target IKLH pada Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan surat nomor S- 318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 dengan perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

Diketahui bahwa terjadi penurunan nilai IKLH 63,31 pada tahun 2022 menjadi 58,13 pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya perubahan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Namun demikian capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada akhir RPJMD berpredikat sangat tinggi.

### **Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Indeks Kualitas / Pencemaran Udara (bobot 0,405), yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambient dengan metode passive sampler di Kabupaten Indragiri Hilir.

**Tabel 3.43**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Udara (IKU)**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93.50	89.85	97.35	90.61	85,34	94.18

Sumber : LKJiP DLHK tahun 2023

IKU (Indek Kualitas Udara) adalah alat ukur sederhana berupa angka untuk memberikan informasi kualitas udara ambien suatu daerah dan dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan kesehatan untuk membantu warga dalam menjaga kesehatan dengan membatasi kegiatan di luar ruangan saat polusi udara sedang meningkat. IKU pada tahun 2022 memiliki target 93.50 dengan realisasi 89.85 dengan capaian 97.35%. Capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1,22 sama halnya seperti nilai IKA, nilai IKU yang telah diperoleh juga menggunakan Aplikasi IKLH. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 mengalami penurunan dari 89,85 di tahun 2022 menjadi 85,34 pada tahun 2023. Untuk pencapaian kinerja pada RPJMD digolongkan **sangat tinggi**.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Penurunan pada nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dapat disebabkan kurangnya titik lokasi pemantau udara

embien yang selama ini masih sebanyak 4 titik. Diharapkan tahun berikutnya dapat menambah titik lokasi pemantauan udara embien.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Program yang menunjang tercapainya indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) antara lain:
- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  - 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
  - 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  - 5) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
  - 6) Program Pengelolaan Persampahan

### **Indeks Kualitas Air (IKA)**

Indeks Kualitas/ Pencemaran Air (0,219), yang diukur berdasarkan parameter-parameter DO, TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Indragiri Hilir. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup parameter yang digunakan dalam perhitungan IKA antara lain derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), nitrat (NO<sub>3</sub>-N), Total fosfat (T- Phospat) dan Fecal coliform (Fecal Coli). Pemantauan kualitas air di kabupaten Indragiri Hilir dilakukan di sungai yang mengalir di kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 44 titik sampel yang diambil secara periodik.

Perbandingan realisasi kinerja indikator IKA dari beberapa tahun terakhir mengalami penurunan kualitas air. Hal tersebut disebabkan perubahan cara perhitungan IKA pada setiap tahun yang dibandingkan dan proses pengujian sampel yang dilakukan.

**Tabel 3.44**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Air (IKA)**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	60.32	43.68	72.41	53.78	35.10	65,27

Sumber : LKJiP DLHK tahun 2023

IKA (Indeks Kualitas Air) merupakan salah satu komponen dalam pemenuhan Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 dengan capaian kinerja sebesar 65,27 dengan target 53.78 dan teralisasi 35.10 di tahun 2023. Capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 37,31%, Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 37,31% dibandingkan Indeks Kualitas Air pada tahun 2022.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :Penurunan nilai capaian Indeks Kualitas Air (IKA) disebabkan adanya data hasil pengujian pada semester II yang tidak bisa di verifikasi, karena tidak semua parameter wajib di uji, yaitu parameter pH dan DO. Untuk parameter lapangan pH dan DO harus dilakukan secara onsite/ diambil dilapangan pada saat pengambilan sampel oleh pihak laboratorium, sesuai lampiran II P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10.2020 sebagai persyaratan tambahan laboratorium lingkungan. Untuk menindak lanjuti masalah ini dapat dilakukan budget sharing dengan pihak laboratorium lingkungan untuk melaksanakan pengambilan dan pengujian kualitas air sungai.
- b. Rekomendasi untuk peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:
  - 1) Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air;
    - b. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;
  - 2) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat;

- 3) Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik;
  - 4) Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air;
  - 5) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.
- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Program yang menunjang tercapainya indikator Indeks Kualitas Air (IKA) antara lain:
- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  - 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
  - 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
  - 5) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  - 6) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
  - 7) Program Pengelolaan Persampahan
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Program yang menunjang tercapainya indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara lain:
- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  - 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
  - 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  - 5) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
  - 6) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
  - 7) Program Pengelolaan Persampahan

### **Indeks Tutupan Hutan /Lahan**

Indeks Tutupan Lahan (bobot 0,219), yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Data yang digunakan adalah data hasil analisis tutupan lahan berdasarkan citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibandingkan dengan analisis data tutupan lahan di Indragiri Hilir.

**Tabel 3.45**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Lahan (IKL)**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	48.32	47.91	99.15	49.05	47,38	96.60

Sumber : LKJiP DLHK tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 mengalami penurunan dari 47,91 di tahun 2022 menjadi 47,38 pada tahun 2023. Untuk pencapaian kinerja pada RPJMD digolongkan sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 mengalami penurunan dari 47,91 di tahun 2022 menjadi 47,38 pada tahun 2023. Untuk pencapaian kinerja pada RPJMD digolongkan sangat tinggi.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :Penurunan pada nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) dapat disebabkan perubahan fungsi dan tutupan lahan pada beberapa lokasi RTH, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara merencanakan pergantian lokasi RTH yang tidak sesuai dan inventarisasi lokasi RTH yang sudah ditetapkan.
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Program yang menunjang tercapainya indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) antara lain:
  - 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  - 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
  - 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  - 5) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
  - 6) Program Pengelolaan Persampahan

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-3 dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

**Tabel 3.46**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-3**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	49,61%	46,67%	94%	Rp.7.001.399.714	Rp.6.361.537.110	90,86%	5,33%
2	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan		67,66	58,13	85,91%	Rp.648.608.000	Rp.598.265.654	92,24%	
3		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	90,61	85,34	94,18%	Rp.357.866.425	Rp.284.835.165	79,59%	
4			53,78	35,10	65,27%	Rp.919.439.588	Rp.473.683.141	51,53%	
5			49,05	47,38	96,60%	Rp1.490.258.200	Rp.1.289.323.988	86,52%	

Dari tabel di atas dapat dilihat, penggunaan sumber daya pada Misi Ke-3 telah **Efisien**. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang bernilai 5,33%. Pada misi ke-3, terdapat 5 (lima) indikator yang menjadi masukan dalam formulasi.

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-3 dilakukan melalui 5 (lima) indikator yakni:

1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3. Indeks Kualitas Udara
4. Indeks Kualitas Air
5. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

#### **Tujuan 4**

#### **Meningkatkan Kualitas SDM Berdaya Saing Berbasis Iman Dan Taqwa**

Pada capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Meningkatkan Kualitas SDM Berdaya Saing Berbasis Iman dan Taqwa, dengan 3 sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengeluaran Per Kapita. diukur dengan 5 (Lima) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur > 25 Tahun, Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Per Kapita.

**Tabel 3.47**  
**Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,53	67,37	99,76	68,08	67,98	100 %
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,62	7,26	95,28	7,86	7,31	93 %
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,26	12,19	91,93	13,56	12,20	90 %
4.	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.8	68.31	99.29%	68.4	68.34	99.59
	Rata-rata Capaian Kinerja				96.57 %			95.65 %

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

**Tabel 3.48**  
**Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,53	67,37	99,76	68,08	67,98	100 %

Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Indragiri Hilir berada pada peringkat ke-11 Se Riau dengan angka 69,12, di bawah rata-rata IPM Riau dan termasuk kategori sedang karena berada pada rentang  $60 \leq \text{IPM} < 70$ . Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Indragiri Hilir berada pada peringkat ke-11 Se-Riau dengan angka 69,12, di bawah rata-rata IPM Riau dan termasuk kategori sedang karena berada pada rentang  $60 \leq \text{IPM} < 70$ . Sedangkan tahun 2023 IPM di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kenaikan persentase yaitu dengan nilai **67,98%**.



## Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan memiliki peran sebagai ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia dengan metode baru dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu PDRB, Angka harapan hidup, Rata lama sekolah, serta Jumlah penduduk miskin menjadi tolak ukur keberhasilan Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Indragiri Hilir

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

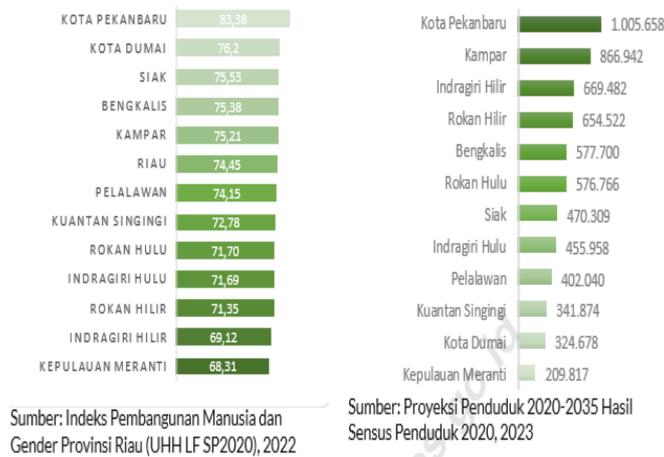
c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

**Tabel 3.49**  
**Capaian Kinerja Mewujudkan SDM Berdaya Saing**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,98
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,20
3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,31

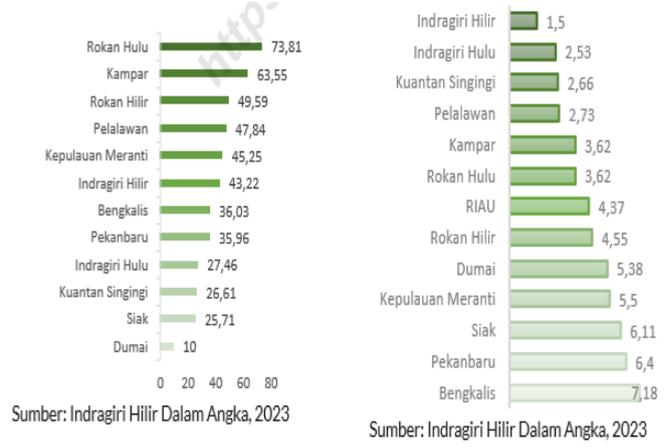
**Gambar Bagan 4.1.2**  
**Bagan Perbandingan Regional IPM dan pertumbuhan penduduk Provinsi Riau**



Penduduk miskin di Indragiri Hilir pada tahun 2022 mencapai 43,22 ribu jiwa, berada di peringkat enam terbawah se Riau. Sedangkan garis kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp

568.879. Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Indragiri Hilir menempati urutan ketiga terbanyak di Riau dengan pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 sebesar 1,21 persen, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Bagan Perbandingan Penduduk Miskin Provinsi Riau Tahun 2023**



BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 kelompok yaitu:

<b>IPM ≥ 80</b>	<b>70 ≤ IPM &lt; 80</b>	<b>60 ≤ IPM &lt; 70</b>	<b>IPM &lt; 60</b>
-----------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

## Rata Rata Lama Sekolah

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan yang tertera pada UUD 1945 Pasal 28c dan 31. Pemenuhan hak tersebut tercermin dari sejauh mana pencapaian partisipasi sekolah yang merupakan hak setiap kalangan, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, termasuk penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan keempat SDGs menjamin kualitas pendidikan inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Kualitas Pendidikan di suatu daerah tercermin dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk Indragiri Hilir adalah 7,26 tahun dengan kata lain penduduk mampu menempuh pendidikan sampai kelas 1 SMP atau hampir menamatkan kelas 2 SMP. Harapan lama sekolah atau lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Indragiri Hilir adalah 12,19 tahun atau setara dengan kelas 3 SMA.

**Tabel 3.50**  
**Target dan realiasi capaian kinerja Dinas Pendidikan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 s.d 2023**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,62	7,26	95,28	7,86	7,31	93

*Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Inhil tahun 2023*

Dari indikator pada tabel di atas menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 sebesar 93% artinya capaian kinerja tersebut cenderung lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2022, dari target 7,86 dengan realisasi sebesar 7,31. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 95,28%.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung Rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Rata-

rata Lama Sekolah, adalah rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Proses penghitungannya menggunakan tiga variabel simultan, yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan, dan ijazah tertinggi yang dimiliki. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi angka Rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang yang ditamatkan.

**Tabel 3.51**  
**Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2021 s.d 2023**

Kabupaten	[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Indragiri Hilir	7,24	7,26	7,31

Sumber data : BPS Kab. Inhil tahun 2023

### Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun.

$$HLS_a^t = FK \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

$HLS_a^t$  : Harapan Lama Sekolah pada umur  $a$  di tahun  $t$

$FK$ : Faktor koreksi pesantren

$E_i^t$ : Jumlah penduduk usia  $i$  yang bersekolah pada tahun  $t$

$i$ : usia ( $a, a+1, \dots, n$ )

**Tabel 3.52**  
**Target dan realiasi capaian kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)**  
**Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 s.d 2023**

Kabupaten	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Indragiri Hilir	11,93	12,19	12,20

Sumber data : BPS Kab. Inhil tahun 2023

**Tabel 3.53**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,26	12,19	91,93	13,56	12,20	90
<i>Sumber : BPS Kab. Inhil</i>								

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yang menggambarkan bahwa kondisi pembangunan pendidikan di Indragiri Hilir terus meningkat. Peningkatan Harapan Lama Sekolah terjadi di Indragiri Hilir hingga tahun 2023

Adapun upaya perbaikan dan pemecahan masalah yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut.

Adapun upaya perbaikan dan pemecahan masalah yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendataan dan monitoring evaluasi terkait kondisi dan kebutuhan sarana prasarana satuan pendidikan untuk segera ditindaklanjuti baik berupa rehabilitasi, pembangunan ataupun pengadaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
- 2) Melakukan pendataan dan pemetaan terhadap guru dan kepala sekolah yang belum memenuhi kompetensi serta melakukan evaluasi terhadap kemungkinan permasalahan yang menjadi penyebabnya. Bagi guru dan kepala sekolah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diusulkan untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi dan selanjutnya mengikuti ujian kompetensi dan selanjutnya mengikuti ujian kompetensi dalam rangka meningkatkan profesionalitasnya. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan terus dihibau dan didorong untuk

meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan linearitas dan profesionalitas sebagai guru dan kepala sekolah.

- 3) Bagi lembaga satuan pendidikan yang belum memenuhi standar kualifikasi untuk memperoleh penilaian akreditasi khususnya untuk predikat Amat baik (A), akan dilakukan monitoring dan evaluasi terkait kondisi dan permasalahan yang mungkin bisa menjadi penyebabnya. Kemudian dilakukan pembinaan, asistensi dan pendampingan untuk lembaga satuan pendidikan tersebut, sehingga dapat meningkatkan manajemen kelembagaan dan standar kualifikasi sehinggalah pada saat proses penilaian akreditasi selanjutnya lembaga satuan pendidikan tersebut dapat memperoleh nilai yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa memperoleh prediket nilai amat baik (A).

Rencana Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 643.846.476.990,00.- (enam ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari :

- 1) Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 490.155.481.921,00.- (empat ratus Sembilan puluh milyar seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dengan persentase dari realisasi anggaran sebesar 91,45%
- 2) Belanja Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp. 153.128.791.669,00.- (seratus lima puluh tiga milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan persentase dari realisasi keuangan sebesar 91,52%.
- 3) Belanja Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp. 562.203.400,00.- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 78,14%

### Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Indragiri Hilir pada



Sumber data : LKjIP Dinkes Kab. Inhil th. 2023

Tahun 2023 dengan target 17,6 sedangkan realisasi sebesar 160,9. Artinya dari tabel data angka kematian di samping menunjukkan tingginya angka harapan hidup yang melebihi dari angka 100 %. Indikator ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kenaikan persentase dalam upaya mencegah angka kematian bayi sejak dini.

**Tabel 3.54**  
**Tabel Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2022 s.d 2023**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Angka Harapan Hidup	Indeks	68.8	68.31	99.29%	68.4	68.34	99.59

Sumber : LKJIP Dinkes Kab. Inhil Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 30 point dengan target 68.4 dan terealisasi sebesar 68.34 dengan nilai persentase 99.59. Jika dibandingkan pada tahun 2022 s.d 2023 maka persentase Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 30%.

### **Pengeluaran Per Kapita**

Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Peningkatan IPM Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP), sebagaimana dijabarkan pada Tabel

Tahun Year	UHH <sup>1</sup> Life Expectancy	HLS/EYS <sup>2</sup>	RLS/MYS <sup>3</sup>	Pengeluaran per Kapita Per Capita Expenditure	IPM/HDI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019	67,66	11,90	7,22	10.382	66,84
2020	67,85	11,91	7,23	9.954	66,54
2021	67,98	11,93	7,24	9.945	66,63
2022	68,31	12,19	7,26	10.234	67,37
2023	68,62	12,20	7,31	10.659	67,98

Catatan/Note: <sup>1</sup>Usia Harapan Hidup hasil dari Proyeksi SP2010

<sup>2</sup>Harapan Lama Sekolah/Expected Years School

<sup>3</sup>Rata-rata Lama Sekolah/Mean Years School

Sumber/Source: BPS, Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia/BPS-Series of Publication of Human Development Index

Angka Pengeluaran Perkapita (APP) merupakan angka pengeluaran rata-rata yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

**Tabel 3.55**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pengeluaran PerKapita	Persentase	13.800	10.234	74 %	14.200	10,659	75 %

Capaian angka pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 sebesar Rp. 10.659 , meningkat sebesar Rp. 4,25 dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 sebesar Rp. 10.234 dengan persentase capaian sebesar 75 %. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ekonomi masyarakat yang

didorong oleh meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-4 dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

**Tabel 3.56**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-4**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa	68,04	69,64	102,35%	Rp.2.467.037.400	Rp.1.905.078.649	77,22%	28,56% (20%)
2		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	7,86	7,31	93%	Rp.153.128.791.669	Rp.140.146.233.290,67	91,52%	
3			13,56	12,20	89,97%	Rp.189.364.214.943	Rp.74.169.742.530	39,17%	
4		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	68,4	68,62	100,32%	Rp.95.846.267.236	Rp.77.379.164.782	80,73%	
5		Pengeluaran per kapita (Rp per kapita per tahun)	14.200	10.659	75%	Rp.1.101.660.506	Rp.919.942.006	83,51%	

Dari tabel di atas dapat dilihat, penggunaan sumber daya pada Misi Ke-4 telah **Efisien**. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang menyentuh nilai maksimum 20%. Pada misi ke-4, terdapat 5 (lima) indikator yang menjadi masukan dalam formulasi.

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-4 dilakukan melalui 5 (lima) indikator yakni:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur >25 tahun
3. Harapan Lama Sekolah
4. Angka Harapan Hidup
5. Pengeluaran per kapita

#### **Tujuan ke-5.1**

#### **Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat**

Capaian kinerja kabupaten Indragiri Hilir adalah meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Pembangunan Daerah, dengan 1 sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya Partisipasi Sosial Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan. diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat.

Partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan seseorang dalam suatu keadaan baik itu secara pikiran, mental, emosi maupun perasaan yang memberikan dorongan untuk melakukan berbagai upaya dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah dibuat dengan penuh rasa kepedulian dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta tindak lanjut dan pemeliharannya dan pengendalian pembangunan serta tindak lanjut dan pemeliharannya

Partisipasi sosial pada dasarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembangunan dan upaya mempermudah mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan dari proses partisipasi sosial bukan hanya pada perumusan kebijakan publik itu sendiri melainkan pada keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai sarana pembelajaran dan mobilisasi sosial atau partisipasi sosial.

**Tabel 3.57**  
**Capaian Kinerja Meningkatkan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat	Persentase	75	55.8	74 %	80	55.8	70 %
<i>Sumber : LKJIP DPMD Kab. Inhil 2023</i>								

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, Perbandingan Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 sebesar 70 % Jika dibandingkan pada tahun 2022 s.d 2023 maka realisasi capaian berada di 55.8 %. Adanya partisipasi atau keterlibatan secara langsung dari masyarakat akan sangat memberikan pengaruh yang besar dalam suatu pembangunan yang akan dilakukan. Karena pada hakikatnya pembangunan yang dilakukan juga ditujukan untuk masyarakat itu sendiri. Adapun beberapa hal yang membuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan itu sangat penting yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan atau sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Pembangunan akan mempercayai proyek atau program pembangunan mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

### **Indikator keberhasilan/Kegagalan**

Dalam suatu pembangunan terdapat tiga konsep dasar yang menjadi indikator keberhasilan yakni kesejahteraan yang dapat diukur dari perekonomian, tingkat pendapatan, dan rasionalitas serta kebebasan. Namun keberhasilan dari suatu pembangunan dapat dilihat juga dari adanya keseimbangan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus membangun kerjasama yang terarah dan sistematis. Artinya, pembangunan yang dilakukan harus dipikirkan secara matang dengan berbagai pertimbangan yang mendukung

dilakukan pembangunan tersebut. Oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi keberhasilan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu :

1. Adanya keterbukaan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat (berpartisipasi) dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa. Keterbukaan disini memungkinkan masyarakat untuk menyusun program/kegiatan pembangunan dan memiliki akses dalam pengambilan keputusan.
2. Menumbukan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, mengawasi dan mengevaluasi, dan pemanfaatannya. Hal ini bisa dilakukan melalui program pemberdayaan oleh pemerintah maupun akademisi dengan memberikan penyuluhan, pengarahan dan pendampingan kepada masyarakat.
3. Memfungsikan dan memperkuat lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan, bimbingan baik oleh pemerintah ataupun oleh akademisi yang membidangi

Sementara adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam suatu partisipasi masyarakat pada pembangunan yaitu :

1. Belum meratanya pemahaman di lingkungan pemerintahan (desa) tentang pentingnya dan keuntungan terkait proses partisipasi.
2. Kebijakan dan peraturan yang mengatur proses partisipasi dalam tata pemerintahan tidak cukup mengikat dan tidak memberikan insentif yang cukup berarti untuk diterapkan secara serius dan berkelanjutan
3. Forum-forum warga atau forum multi-pihak yang berpotensi menjadi media penyalur suara seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan diri menjadi lembaga yang demokratis dan kuat.
4. Para perencana, pelaksana dan fasilitator program partisipatif sering menghadapi kesulitan terkait mekanisme atau prosedur baru partisipatif dalam pembangunan.

## Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-5 dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

**Tabel 3.58**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-5**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	80%	55,8%	69,7%	Rp.1.226.825.470	Rp.998.575.731	81,40%	-2,11%
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		20	20	100%	Rp.293.003.550	Rp.173.772.549	81,60%	
3		Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	85,00	N/A	N/A	Rp.637.520.000	Rp.428.211.797	74,66%	

Dari tabel di atas dapat dilihat, penggunaan sumber daya pada Misi Ke-5 **Tidak Efisien**. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang bernilai -2,11%. Pada misi ke-5, terdapat 3 (tiga) indikator yang seyogyanya menjadi masukan dalam formulasi. Namun, dikarenakan adanya 1 (satu) indikator yang tidak atau belum memiliki nilai capaian, yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG). Maka, indikator kinerja ini mesti dikeluarkan dalam formulasi penghitungan agar hasil penghitungan dapat proporsional.

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-5 dilakukan melalui 2 (dua) indikator yakni:

1. Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat
2. Status indeks desa membangun

### Tujuan 5.2

#### **Meningkatnya Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi capaian sasaran, sesuai dengan indikator kinerja masing-masing. Untuk mengetahui tingkat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 dilakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan sasaran maupun target indikator kinerja pada capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Pembangunan, sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan Meningkatnya Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dapat diukur dengan indikator yaitu Status Indeks Desa Membangun dan Tingkat Keberdayaan Masyarakat

**Tabel 3.59**  
**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Status Indeks Desa	Status	Maju	Maju	100 %	Maju	Maju	100 %

	Membangun							
2.	Indeks Pembangunan Gender	Persentase	84,00	82,74	99 %	85,00	NA	NA
					199 %			

### **Status Indeks Desa Membangun**

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta Kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan Aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan Intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa.

Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendes No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya.

Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Indeks Desa Membangun adalah Adalah alat bantu pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDTT. Dengan demikian hasil analisa IDM dalam penetapan status Kemandirian Desa akan dapat menjadi alat bantu pengintegrasian perencanaan. Indeks Desa Membangun diperlukan sebagai acuan terhadap status desa diatur dalam PermendesaPDTTtrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Menyadari Desa secara esensial merupakan Pemerintahan Otonomi Tingkat 4, tingkatan paling dasar (Pondasi) dari 4 lapis Struktur NKRI (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), sekaligus masyarakat Desa adalah Entitas Komunitas Bangsa Nusantara yang terkecil (Inti). Maka harus dapat dipastikan penyusunan IDM berdasarkan substansi berbagai regulasi dalam kerangka pelaksanaan kebijakan konsep pembangunan nasional yang paripurna dalam semua aspek yang telah ditetapkan secara nasional. Selain hal tersebut, juga harus dapat dipastikan IDM telah sejalan dengan strategi pencapaian sasaran strategis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara berkelanjutan.

IDM secara teknokrasi disusun sesuai dengan Konsep kebijakan pembangunan Desa untuk mencapai 9 Tujuan UU Desa sebagai amanah UU Desa, melaksanakan amanah Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019, serta sejalan otoritas mandat Perpres no 12, 2015 Tentang Kementerian Desa, PDTT dan memegang teguh amanah dan mandat Konstitusi UUD 1945 beserta peraturan perundang undangan yang ada dalam NKRI, mewujudkan falsafah negara Pancasila sebagai acuan pembangunan, sekaligus menghormati keberagaman Desa dengan paradigma Bhineka Tunggal Ika.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Status Indeks Desa Membangun disusun dari tiga pilar utama yaitu :

1. Indeks Ketahanan Pangan terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial), dimensi kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan), dimensi pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses kependidikan non formal dan akses ke pengetahuan), dan dimensi permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). Dalam Indeks Desa membangun ada lima (lima) klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa yaitu:
  - a. Desa mandiri atau sangat maju (Desa Sembada) adalah desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan/ ekologi yang berkelanjutan.
  - b. Desa maju (Desa–Prasembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
  - c. Desa Berkembang (Desa Madya) adalah Desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya.
  - d. Desa Tertinggal (Pra-Madya) adalah Desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang dimiliki, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
  - e. Desa sangat tertinggal (Desa Pratama) adalah Desa yang mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk dan juga rentan terhadap konflik sosial, guncangan ekonomi dan juga berbagai bencana alam. Sehingga tidak mampu untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi, sosial dan ekologi yang

dimiliki.

Adapun rentang skor pengukuran status desa dalam Idm dari 0,27-0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

- a. Desa Mandiri atau sangat maju (Desa Sembada) : >0,815
- b. Desa Maju (Desa-Prasembada) : > 0,707 dan <0,815
- c. Desa Berkembang (Desa Madya) : > 0,599 dan < 0,707
- d. Desa tertinggal (Desa Pra-Madya) : > 0,491 dan < 0,599
- e. Desa sangat Tertinggal (Desa Pratama) : < 0,491

Pada tahun 2023, Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam status indeks desa membangun terpokus pada Desa Maju, dan tidak mengesampingkan status desa yang lain. Untuk mengetahui Sasaran Meningkatnya Program Masyarakat Pedesaan melalui Indikator Status Indeks Desa Membangun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.60**  
**Capaian Indikator Status Indeks Desa Membangun**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Status Indeks Desa Membangun	Status	Maju	Maju	100 %	Maju	Maju Maju	100 %

Sumber : LKJIP DPMD Kab. Inhil 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas pada tahun 2022 Status Indeks Desa Membangun terfokus pada Desa Maju. Pada tahun 2023 Status indeks Desa Membangun juga difokuskan pada desa maju dengan jumlah 86 desa yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada dikabupaten Indragiri Hilir. Untuk melihat rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 untuk Desa maju dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.61**  
**Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023**

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STATUS IDM
1	Reteh	Pulau kecil	0,76	0,6333	0,8667	0,7533	Maju
2	Reteh	Sungai Undan	0,8	0,6	1	0,8	Maju
3	Reteh	Sungai Asam	0,72	0,5667	0,8667	0,7178	Maju

4	Enok	Sungai Ambat	0,8857	0,6833	0,8	0,7897	Maju
5	Enok	Simpang Tiga Daratan	0,7886	0,6167	0,9333	0,7795	Maju
6	Tempuling	Mumpa	0,8229	0,5667	0,8667	0,7521	Maju
7	Tempuling	Karya Tunas Jaya	0,7886	0,7	0,9333	0,8073	Maju
8	Gaung Anak Serka	Kuala Gaung	0,7429	0,5167	0,8667	0,7087	Maju
9	Gaung Anak Serka	Teluk Pantaian	0,8	0,6667	0,6667	0,7111	Maju
10	Gaung Anak Serka	Sungai Iliran	0,7943	0,5667	0,8667	0,7425	Maju
11	Gaung Anak Serka	Rambaian	0,8286	0,5667	1	0,7984	Maju
12	Gaung Anak Serka	Idaman	0,8571	0,5833	0,7333	0,7246	Maju
13	Mandah	Belaras	0,8343	0,6667	0,6667	0,7225	Maju
14	Mandah	Igal	0,7886	0,4833	0,9333	0,7351	Maju
15	Mandah	Bakau Aceh	0,8286	0,5833	0,7333	0,7151	Maju
16	Mandah	Batang Tumu	0,92	0,5833	0,8	0,7678	Maju
17	Mandah	Bantayan	0,8629	0,6333	0,6667	0,721	Maju
18	Mandah	Cahaya Baru	0,8686	0,55	0,8	0,7395	Maju
19	Kateman	Kuala Selat	0,7714	0,5167	0,8667	0,7183	Maju
20	Kateman	Sungai Simbar	0,7143	0,55	0,8667	0,7103	Maju
21	Kateman	Penjuru	0,7943	0,6	0,7333	0,7092	Maju
22	Kateman	Tanjung Raja	0,7486	0,55	0,8667	0,7217	Maju
23	Kateman	Sungai Teritip	0,7886	0,5333	0,8667	0,7295	Maju
24	Keritang	Pabenaan	0,7143	0,6	0,9333	0,7492	Maju
25	Keritang	Seberang Pabenaan	0,7314	0,5833	0,8667	0,7271	Maju
26	Keritang	Nusantara Jaya	0,8057	0,65	0,9333	0,7963	Maju
27	Keritang	Kembang Mekar Sari	0,8457	0,5667	0,9333	0,7819	Maju
28	Keritang	Kuala Keritang	0,9371	0,6	0,6	0,7124	Maju
29	Keritang	Kuala Lemang	0,7143	0,5667	0,9333	0,7381	Maju
30	Keritang	Teluk Kelasa	0,7771	0,6667	0,9333	0,7924	Maju
31	Keritang	Lintas Utara	0,8743	0,6167	0,9333	0,8081	Maju
32	Keritang	Kayu Raja	0,7657	0,5833	0,8	0,7163	Maju
33	Tanah Merah	Sungai Nyiur	0,7143	0,65	0,9333	0,7659	Maju
34	Tanah Merah	Tanjung Baru	0,8629	0,7167	0,6	0,7265	Maju
35	Tanah Merah	Tekulai Bugis	0,7371	0,4833	0,9333	0,7179	Maju
36	Batang Tuaka	Sungai Luar	0,8	0,6167	0,8667	0,7611	Maju
37	Batang Tuaka	Kuala Sebatu	0,8286	0,5833	0,8	0,7373	Maju
38	Gaung	Simpang Gaung	0,7943	0,6833	0,8	0,7592	Maju
39	Gaung	Belantaraya	0,8514	0,65	0,6667	0,7227	Maju
40	Tembilahan Hulu	Pulau Palas	0,7314	0,6833	0,8667	0,7605	Maju
41	Kemuning	Tuk Jimun	0,8057	0,7833	0,8	0,7963	Maju
42	Kemuning	Kemuning Tua	0,8057	0,8	0,6667	0,7575	Maju
43	Kemuning	Limau Manis	0,7943	0,7333	0,7333	0,7537	Maju
44	Kemuning	Talang Jangkang	0,7543	0,7333	0,8667	0,7848	Maju

45	Pelangiran	Rotan Semelur	0,7371	0,55	0,9333	0,7402	Maju
46	Pelangiran	Simpang Kateman	0,7086	0,65	0,8667	0,7417	Maju
47	Pelangiran	Tanjung Simpang	0,7543	0,7333	0,8667	0,7848	Maju
48	Pelangiran	Baung Rejo Jaya	0,68	0,6667	0,9333	0,76	Maju
48	Pelangiran	Tagagiri Tama Jaya	0,7143	0,6	0,9333	0,7492	Maju
50	Pelangiran	Pinang Jaya	0,7543	0,55	0,9333	0,7459	Maju
51	Pelangiran	Wonosari	0,7086	0,65	0,9333	0,764	Maju
52	Pelangiran	Tegal Rejo	0,8229	0,4667	0,9333	0,741	Maju
53	Pelangiran	Intan Mulya Jaya	0,7543	0,4833	0,9333	0,7237	Maju
54	Pelangiran	Saka Palas Jaya	0,7714	0,5333	0,8667	0,7238	Maju
55	Pelangiran	Teluk Bunian	0,7029	0,6	0,8667	0,7232	Maju
56	Pelangiran	Terusan Beringin Jaya	0,7143	0,6333	0,8	0,7159	Maju
57	Pelangiran	Hidayah	0,6857	0,6667	0,9333	0,7619	Maju
58	Teluk Belengkong	Hibrida Mulya	0,7486	0,5333	0,1	0,7606	Maju
59	Teluk Belengkong	Indra Sari Jaya	0,7086	0,5667	0,9333	0,7362	Maju
60	Teluk Belengkong	Tunggal Rahayu Jaya	0,7829	0,55	1	0,7776	Maju
61	Teluk Belengkong	Griya Mukti Jaya	0,7543	0,65	0,8	0,7348	Maju
62	Teluk Belengkong	Beringin Mulya	0,8114	0,5333	1	0,7816	Maju
63	Teluk Belengkong	Hibrida Jaya	0,8343	0,6333	0,6667	0,7114	Maju
64	Teluk Belengkong	Sumber Jaya	0,7714	0,5333	0,9333	0,746	Maju
65	Teluk Belengkong	Sumber Makmur Jaya	0,7486	0,4833	0,9333	0,7217	Maju
66	Teluk Belengkong	Sumber Sari Jaya	0,76	0,4667	0,9333	0,72	Maju
67	Teluk Belengkong	Kelapa Patih Jaya	0,7771	0,5833	0,8667	0,7424	Maju
68	Teluk Belengkong	Sapta Mulya Jaya	0,7371	0,4	1	0,7124	Maju
69	Teluk Belengkong	Saka Rotan	0,88	0,5333	0,9333	0,7822	Maju
70	Teluk Belengkong	Gembaran	0,7886	0,4167	0,9333	0,7129	Maju
71	Pulau Burung	Teluk Nibung	0,8686	0,6833	0,6667	0,7395	Maju
72	Pulau Burung	Mayang Sari Jaya	0,8343	0,75	0,8	0,7948	Maju
73	Pulau Burung	Manunggal Jaya	0,8229	0,6667	0,9333	0,8076	Maju
74	Pulau Burung	Ringin Jaya	0,7714	0,8	0,8667	0,8127	Maju
75	Pulau Burung	Sri Damai	0,7371	0,7	0,8667	0,7679	Maju
76	Pulau Burung	Sapta Jaya	0,7886	0,6833	0,8	0,7573	Maju
77	Pulau Burung	Suka Jaya	0,7257	0,7667	0,8667	0,7863	Maju
78	Pulau Burung	Sukaharjo Jaya	0,7886	0,7167	0,7333	0,7462	Maju
79	Concong	Concong	0,8	0,5833	0,8	0,7278	Maju

		Tengah					
80	Kempas	Pekan Tua	0,7943	0,65	0,9333	0,7925	Maju
81	Kempas	Karya Tani	0,7714	0,4667	0,9333	0,7238	Maju
82	Kempas	Kulim Jaya	0,7543	0,5	0,9333	0,7292	Maju
83	Kempas	Danau Pulai Indah	0,8343	0,6167	0,8	0,7503	Maju
84	Kempas	Sungai Rabbit	0,7657	0,5	0,8667	0,7108	Maju
85	Sungai Batang	Benteng Utara	0,8343	0,6333	0,8667	0,7781	Maju
86	Sungai Batang	Mugo Mulyo	0,7771	0,75	0,8667	0,7979	Maju

Indeks Desa Membangun pada tahun 2023 yang terfokus pada Desa Maju tidak serta merta berjalan dengan mulus, ada beberapa kendala yang bisa menjadi hambatan untuk terwujudnya Desa Maju diantaranya :

1. Masih adanya ketidaksepahaman terkait penginfutan kuisisioner Indeks Desa Membangun di antara Perangkat Desa dan Pendamping Desa yang berimbas terhadap hasil Status Desa.
2. Data Indeks Desa Membangun pada tahun-tahun sebelumnya tidak dipakai dalam menentukan program/ kegiatan pada desa dan Perangkat Daerah baik itu di level Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
3. Program/ Kegiatan masih belum tepat sasaran dan belum ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan daerah.
4. Masih adanya ketidaksepahaman terkait penginfutan kuisisioner Indeks Desa Membangun di antara Perangkat Desa dan Pendamping Desa yang berimbas terhadap hasil Status Desa.

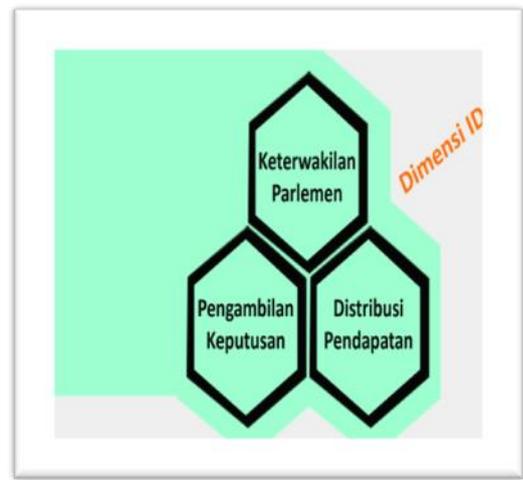
Selain kendala diatas juga ada kendala lain yang juga mempunyai pengaruh besar untuk menuju desa maju diantaranya:

1. Infrastruktur yang terbatas, jalan-jalan desa yang rusak dan akses transportasi yang kurang memadai merupakan hambatan dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata. Infrastruktur yang buruk juga menghambat akses penduduk ke fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak.
2. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam pembangunan desa. Desa membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam berbagai bidang, seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Namun pendidikan dan pelatihan yang tersedia masih terbatas.
3. Kesejahteraan Masyarakat yang rendah juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup di desa. Tingkat kemiskinan yang tinggi, akses

terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya lapangan kerja yang layak merupakan beberapa permasalahan yang harus diatasi.

Dengan masih adanya kendala/ Hambatan dalam meningkatkan program masyarakat pedesaan menuju desa maju yang sudah di programkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan solusi untuk kemajuan desa diantaranya :

- a. Dengan Adanya bimbingan teknis diharapkan adanya kesepahaman terkait penginputan kuisisioner data Indeks Desa Membangun.
- b. Dengan adanya data Indeks Desa Membangun dapat dipakai sebagai dasar dan acuan penetapan program dan kegiatan bagi pihak terkait.
- c. Dengan dipakainya data Indeks Desa Membangun diharapkan dapat meningkatkan Status Desa.



### **Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam berbagai sektor pembangunan**

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

**Tabel 3.62**  
**Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Indeks Pembangunan Gender	Persentase	84,00	82,74	99 %	85,00	NA	NA

*Sumber : BPS Kab. Inhil*

Capaian Indikator untuk Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2023 belum di dapatkan datanya dikarenakan belum publish/dirilis. Dari Data BPS perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Kabupaten/kota di Provinsi Riau 2019-2022 diperoleh sebagai berikut :

**Tabel 13.8**      **Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau, 2019 - 2023**  
*Gender Development Index (GDI) by Regency/Municipality in Riau Province, 2019 - 2023*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kuantan Singingi	90,57	90,16	90,06	90,48	...
Indragiri Hulu	87,33	86,94	86,69	86,73	...
Indragiri Hilir	82,57	82,34	82,37	82,74	...
Pelalawan	88,51	88,06	88,73	88,94	...
Siak	88,58	88,62	88,69	88,79	...
Kampar	89,83	89,52	89,79	89,81	...
Rokan Hulu	82,13	81,88	82,12	82,44	...
Bengkalis	90,08	90,07	90,10	90,11	...
Rokan Hilir	85,22	84,91	84,65	85,13	...
Kepulauan Meranti	86,2	86,30	86,45	86,97	...
Kota Pekanbaru	93,12	93,01	93,27	93,63	...
Kota Dumai	90,86	90,66	90,72	90,74	...
<b>Provinsi Riau</b>	<b>88,43</b>	<b>88,10</b>	<b>88,38</b>	<b>88,71</b>	<b>...</b>

Catatan/Note:  
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau/BPS - Statistics of Riau Province

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan trend positif, dimana tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dari 82.57 meningkat menjadi 82.74. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun tahun empat tahun terakhir tersebut menunjukkan kondisi yang stabil.

## Tujuan 6.1

### Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial

Capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Meningkatkan Kerukunan, Keamanan dan Ketentraman Sosial, dengan 2 sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Sosial Masyarakat dan Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak. diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Indeks Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Sosial, dan Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

**Tabel 3.63**

#### Capaian Kinerja Meningkatkan Kerukunan, Keamanan dan Ketentraman Sosial

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Sosial	Persentase	60,65	73,50 120	120 %	100	100	100
2	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase	100	100	100	100	100	100
Rata Rata Capaian					220%			200 %

#### Persentase Keamanan Ketertiban dan ketentraman sosial

Salah satu keinginan masyarakat dalam menjalani kehidupannya adalah adanya rasa tentram, nyaman dan aman dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir hadir dalam mewujudkan ketentraman dan kenyamanan wilayah termasuk didalamnya keamanan dan ketertiban agar kondusivitas wilayah tetap terjaga. Guna mencapai tujuan tersebut maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai adalah

- Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial masyarakat, dengan indeks rasa aman.
- Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%).

Rasa Aman adalah Rasa yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan.

Konsep ini sering digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Indeks ini mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan orang-orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

**Tabel 3.64**

No	Indikator Kinerja	Capaian					2023		Target Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	2023
1	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	46%	84%	92%	93%	95%	100%	100%	100%
2	Angka Pelanggaran Trantibmas	2820	1237	864	1208	1841	576	1593	576

Sumber: LKJIP SatpolPP 2023

**Tabel 3.65**

**Indikator Persentase Keamanan dan Ketentraman Sosial**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Sosial	Persentase	60,65	73,50	120 %	100	100	100

Sumber : LKJIP Satpol PP

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa Persentase Keamanan dan Ketertiban dan Ketentraman Sosial sebagai tolok ukur capaian kinerja Mewujudkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Sosial pada tahun 2023 dengan target 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian

kinerja 100%, berarti telah sesuai target yang direncanakan. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

Berdasarkan Hasil pengukuran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan indikator kinerja utama Satuan polisi pamong praja telah tercapai 100 % dengan formula pengukuran jumlah pengaduan yang ditangani / jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk artinya semua pengaduan pelanggaran Keamanan, ketertiban, ketentraman (K3) yang masuk pada satuan polisi Pamong Praja baik itu secara langsung maupun digital sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Keberhasilan tersebut didukung oleh faktor sebagai berikut :

- a. Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan;
- b. Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang terselesaikan
- c. Patroli wilayah secara rutin dan sosialisasi perda oleh satpol pp dilapangan mampumemberi pemahaman akan peraturan daerah
- d. Antusias personil Saptol pp dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah PNS masih kurang sesuai aturan yang ada
- e. Tidak ada lagi kasus Konflik Politik yang terjadi sehingga penurunan konflik politik di KabupatenIndragiri Hilir
- f. Patroli wilayah dilakukan secara terus menerus sebanyak 4 kali dalam 1 hari oleh TimPatroli Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat (Satgas Trantibunus) dan Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisis Pamong Raja Kabupaten Indragiri Hilir
- g. Adanya Portal Pengaduan Masyarakat melalui Website Saptol PP Kab. Inhil (<http://satpolpp.inhikab.go.id>) Lapor URC SAJA Bermenu Si Pentol Kuah (Sistem Informasi Pengaduan Terkini, Online, Akurat dan Terarah

## **Tujuan 6.2**

### **Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Korban kasus kekerasan memang bisa dari kalangan mana saja, perempuan atau laki-laki, anak-anak atau dewasa. Namun, kasus kekerasan banyak terjadi kepada perempuan dan anak-anak karena sifatnya yang dianggap

lemah dan tidak berdaya oleh pelaku kekerasan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online (SIMFONI) Kementerian PPPA menunjukkan kasus kekerasan paling banyak terjadi di rumah tangga, fasilitas umum, dan tempat lainnya, sedangkan kasus kekerasan di tempat kerja dan sekolah jumlahnya kecil. Kekerasan seksual menempati urutan pertama korban terbanyak, disusul kekerasan fisik, psikis, kekerasan lainnya, penelantaran, trafficking, dan eksploitasi. Dampak buruk yang terjadi dari tindak kekerasan ini adalah kehamilan yang tidak diinginkan, disrupted lingkungan, gangguan mental, luka fisik dan kematian, dan lingkungan menjadi pasif. Usia korban kekerasan terbanyak ada pada rentang usia 13-17 tahun, usia 25-44 tahun, 6-12 tahun, 18-24 tahun, 0-5 tahun, 45-59 tahun, dan 60 tahun lebih.

Pemerintah melalui Dinas P2KBP3A Kabupaten Indragiri Hilir selalu berupaya hadir dan membantu menangani kasus kekerasan yang dilaporkan masyarakat. Pada tahun 2023, ada sebanyak 42 kasus diantaranya Kasus Kekerasan Perempuan dan anak (KDRT). Kasus ini berhasil ditangani 100%, sehingga capaian kerjanya adalah 100%. Berikut ini adalah cara perhitungan, target, realisasi, dan capaian kinerja penanganan kasus kekerasan kepada perempuan dan anak tahun 2023.

**Tabel 3.66**  
**Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase	100	100	100	100	100	100

*Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Persentase capaian Indikator kinerja persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022 dan 2023 capaian realisasi 100 % karena jumlah kasus kekerasan sudah ditangani.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-6 dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

**Tabel 3.67**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-6**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial	100%	100%	100%	Rp.9.012.960.000	Rp.7.821.348.913	86,78%	13,34%
2		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	Rp.345.147.900	Rp.288.443.709	83,57%	

Dari tabel di atas dapat dilihat, penggunaan sumber daya pada Misi Ke-6 telah **Efisien**. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang bernilai 13,34%. Pada misi ke-6, terdapat 2 (dua) indikator yang menjadi masukan dalam formulasi.

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-6 dilakukan melalui 2 (dua) indikator yakni:

1. Persentase keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)
2. Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

### Tujuan 7

#### Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran

Capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Meningkatkan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan 2 sasaran strategis, yaitu: Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Menurunnya Tingkat Pengangguran. dengan 3 (Tiga) indikator yaitu PRDB Per Kapita, Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

**Tabel 3.68**  
**Capaian Kinerja Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PDRB Per Kapita	%	70,5	126	179 %	72,5	143	198 %
2	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	5,34	5,98	111 %	5,00	5,64	113 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,00	1,50	38 %	3,00	1,71	57 %
Rata-Rata Capaian					109 %			123 %
Sumber : Data BPS.Kab. Inhil 2024 dan Olahan Bagian Organisasi								

## **PDRB Per Kapita**

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan berbagai macam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektorsektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Salah satu tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang disertai upaya pengentasan kemiskinan antara lain dengan melakukan perbaikan kondisi kesehatan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kualitas dan menciptakan kemandirian SDM sehingga berpeluang besar dapat berperan dalam memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.

Rincian/Description	Satuan/Unit	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>SOSIAL/SOCIAL</b>				
Penduduk <sup>1</sup> /Population <sup>1</sup>	juta/million	658.025	660.747	695.571
Laju Pertumbuhan Penduduk <sup>2</sup> /Population Growth <sup>2</sup>	%	0,36	0,04	5,27
Angka Harapan Hidup <sup>-e</sup> /Life Expectancy Rate <sup>2</sup>	tahun/years	67,98	68,31	68,62
Angka Melek Huruf Usia 15+/ <i>Literacy Rate Aged 15+</i>	%	98,10	97,94	97,94
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK <sup>3</sup>	%	68,56	63,97	60,72
Labour Force Participation Rate-LFPP				
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT <sup>3</sup>	%	2,66	1,50	1,71
Unemployment Rate-UR <sup>3</sup>				
Penduduk Miskin <sup>4</sup> /Poor People <sup>2</sup>	Ribu/thousand	44,61	43,22	40,86
Persentase Penduduk Miskin <sup>4</sup>	%	6,74	6,46	6,03
Percentage of Poor People <sup>4</sup>				
Indeks Pembangunan Manusia-IPM <sup>4</sup>	-	66,63	67,37	67,98
Human Development Index <sup>4</sup>				
<b>EKONOMI/ECONOMIC</b>				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku <sup>1</sup>	Miliar rupiah	73.352,31	83.163,75	87.546,37
Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price <sup>2</sup>	Billions rupiahs			
Laju Pertumbuhan Ekonomi <sup>4</sup> /Economic Growth <sup>4</sup>	%	4,41	5,25	3,17
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	juta rupiah	110.896,40	124.221,03	129.259,80
Per Capita of GRDP at Current Price	million rupiahs			
Inflasi/Inflation (y-o-y)	%	1,09 <sup>5</sup>	4,82 <sup>6</sup>	1,53 <sup>7</sup>

Berdasarkan data kependudukan pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Indragiri Hilir sebanyak 695.571 jiwa. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 menurut data BPS sebesar 87.546.37

$\text{PDRB Adh Berlaku} \times 100$

Jumlah Penduduk

$$= \frac{87.546.370.00}{695.571 \text{ Jiwa}} = \frac{125.862.59.30}{87.546.75} = 143,77 \%$$

**Tabel 3.69**  
**Capaian Persentase PDRB Per Kapita**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PDRB Per Kapita	%	70,5	126	179 %	72,5	143	198 %

Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Persentase capaian Indikator kinerja persentase PDRB Perkapita tahun 2023 capaian realisasi 143 % dengan capaian kinerja 198 % naik 19 % dibanding tahun 2022.

### **Persentase Penduduk Miskin**

Persentase penduduk miskin menggambarkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan, yang mana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan dibawah garis kemiskinan, Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin Berdasarkan Hasil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dan persentase kemiskinan memiliki tren menurun Selama periode 2022-2023

**Tabel 3.70**  
**Capaian Menurunnya Tingkat Kemiskinan**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	5,34	5,98	111 %	5,00	5,64	113 %

Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi

Pada tahun 2023 garis kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Rp 597.122 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 40,86 (000) orang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dari tahun 2022 yaitu 5,64 persen pada tahun 2023 dan 5,98 pada tahun 2022. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan persentase

penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari kebijakan dan program pemerintah baik pusat maupun daerah.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dari sisi ekonomi :
  - a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang.
  - b. Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.
  - c. Kemiskinan muncul sebagai akses perbedaan akses dalam modal, dimana aliran modal lebih banyak berpusat pada daerah perkotaan.
2. Empat faktor penyebab kemiskinan.
  - a. rendahnya taraf pendidikan;
  - b. rendahnya taraf kesehatan;
  - c. terbatasnya lapangan kerja; dan
  - d. kondisi keterisolasian.
3. Menyatakan suatu keluarga menjadi miskin disebabkan oleh tiga faktor, yaitu :
  - a. faktor sumber daya manusia;
  - b. faktor sumber daya alam; dan
  - c. faktor teknologi.

Sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan, dependensi ratio, nilai sikap, partisipasi, ketrampilan pekerjaan dan kesemuanya itu tergantung kepada sosial budaya masyarakat itu sendiri juga penyebab terjadinya kemiskinan dimana akibat dari berbagai faktor yang terdiri dari :

1. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pengembangan diri yang terbatas.
2. Rendahnya tingkat kesehatan dimana tingkat kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan daya tahan fisik, daya pikir serta prakarsa menjadi pula.
3. Terbatasnya lapangan kerja, selama lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha masih ada, harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan masih dapat dilakukan.
4. Kondisi terisolasi, dalam kondisi terpencil atau terisolasi penduduk akan kurang mampu menjalankan roda perekonomiannya.

Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda dimana tergantung dari pengalaman dan perspektif analisis. Cara pandang

analisis akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana kemiskinan itu terjadi (sebab-sebab kemiskinan) dan penanggulangan kemiskinan dapat diatasi. Oleh karena itu, agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjelaskan pengertian dan penyebab kemiskinan secara lengkap. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam kategori miskin, Namun, menurut World Bank setidaknya ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu :

1. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan pasar, seperti : makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat.
3. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Terus Gencar dalam penanganan kemiskinan ekstrim kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas adalah kegiatan yang sejalan dengan program nasional dan memiliki dampak secara langsung terhadap pembangunan di masyarakat dengan mengusulkan program atau kegiatan, yang harus diprioritaskan adalah program yg sejalan dengan program nasional, yaitu program terkait penentasan kemiskinan ekstrem.

### **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.



**Tabel 3.71**  
**Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,00	1,50	38 %	3,00	1,71	57 %

*Sumber : Data BPS.Kab. Inhil 2024*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 1,71%. Dengan capaian sebesar 57 % Jika dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2022 TPT sebesar 1,5%.mengalami kenaikan capaian realisasi sebesar 0,21 %/

Adapun penyebab tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan disebabkan beberapa faktor adalah pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi, dan ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja.

Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat memberikan solusi dalam rangka Menurunkan tingkat pengangguran terbuka, melalui :

1. Membuka pintu investasi sehingga banyak orang berusaha membuka lapangan kerja, caranya yaitu berinvestasi sektor riil misalnya: sektor produksi, property, perkebunan, jasa dan lain-lain;
2. Memberi peluang masyarakat sebagai wirausaha melalui pembinaan dan pengembangan UMKM; dan
3. Memberi kesempatan bagi pencari kerja untuk dilatih pada Balai Latihan Kerja (BLK).

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-7 dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

**Tabel 3.72**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-7**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	72,5%	143,77%	198,33%	Rp.1.101.660.506	Rp.919.942.006	83,51%	62,81% (20%)
2		Menurunnya tingkat kemiskinan	5%	5,64%	112,8%	Rp.620.210.000	Rp.428.211.797	82,51%	
3		Menurunnya tingkat pengangguran	3%	1,71%	57%	Rp.2.345.173.200	Rp.221.940.004	9,46%	

Dari tabel di atas dapat dilihat, penggunaan sumber daya pada Misi Ke-7 telah **Efisien**. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang menyentuh nilai maksimum 20%. Pada misi ke-7, terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi masukan dalam formulasi.

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-7 dilakukan melalui 3 (tiga) indikator yakni:

1. PDRB per kapita (Rp)
2. Persentase Penduduk Miskin (%)
3. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)

### Tujuan ke 8

#### Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah, dengan 3 sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya, Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah, Meningkatnya Nilai Ekspor Daerah dan Meningkatnya Daya Saing Daerah. Tujuan ke-8, diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Nilai Investasi PMDN, Nilai Ekspor Bersih Perdagangan dan Indeks Daya Saing Daerah.

**Tabel 3.73**  
**Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,30%	5,25%	122,09	4,90%	3,17%	64,69
	Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Rp. Milyar	Milyar	2.244	7.439	331,51	1.100	3.627	329,73
	Nilai ekspor Bersih Perdagangan ( USD ) Juta	Juta/USD	300,00	736,98	245,66%	330,00	914,00	276,97%
	Indeks Daya Saing Daerah	Kategori	Sedang	Tinggi 2,82	113 %	Tinggi	Tinggi 2,79	100 %
	Rata-Rata Capaian				203 %			168 %

## Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara masa kini dan periode sebelumnya.

Komponen yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk nasional bruto (PNB) atau produk domestik bruto (PDB).

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Ekonomi dikatakan tumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menjadi sasaran utama pembangunan sebab tanpa kondisi ekonomi yang baik tujuan pembangunan lainnya sulit untuk diwujudkan.

**Tabel 3.74**  
**Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,30%	5,25%	122,09	4,90%	3,17%	64,69

Sumber : Data BPS.Kab. Inhil 2024

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 adalah sebesar 3,17% dari target sebesar 4,90% dengan persentase capaian sebesar 64,69%. Dari data yang diperoleh, realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 tumbuh melambat di level 3,71%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi yang berada pada level 5,25%. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan capaian pada indikator laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 122,09% menjadi 64,69% di tahun 2023.

## **PDRB Per Kapita**

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan berbagai macam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektorsektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Salah satu tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang disertai upaya pengentasan kemiskinan antara lain dengan melakukan perbaikan kondisi kesehatan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kualitas dan menciptakan kemandirian SDM sehingga berpeluang besar dapat berperan dalam memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.

Rincian/Description (1)	Satuan/Unit (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
<b>SOSIAL/SOCIAL</b>				
Penduduk/Population <sup>1</sup>	juta/million	658.025	660.747	695.571
Laju Pertumbuhan Penduduk/Population Growth <sup>2</sup>	%	0,36	0,04	5,27
Angka Harapan Hidup <sup>3</sup> -e/Life Expectancy Rate <sup>3</sup>	tahun/years	67,98	68,31	68,62
Angka Melek Huruf Usia 15+/Literacy Rate Aged 15+	%	98,10	97,94	97,94
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK <sup>4</sup>	%	68,56	63,97	60,72
Labour Force Participation Rate-LFPR <sup>4</sup>				
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT <sup>5</sup>	%	2,66	1,50	1,71
Unemployment Rate-UR <sup>5</sup>				
Penduduk Miskin <sup>6</sup> /Poor People <sup>6</sup>	Ribu/thousand	44,61	43,22	40,86
Persentase Penduduk Miskin <sup>6</sup>	%	6,74	6,46	6,03
Percentage of Poor People <sup>6</sup>				
Indeks Pembangunan Manusia-IPM <sup>7</sup>	-	66,63	67,37	67,98
Human Development Index <sup>7</sup>				
<b>EKONOMI/ECONOMIC</b>				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku <sup>1</sup>	Miliar rupiah	73.352,31	83.163,75	87.546,37
Gross Regional Domestic Bruto (GDRP) at Current Price <sup>1</sup>	Billions rupiahs			
Laju Pertumbuhan Ekonomi/Economic Growth <sup>4</sup>	%	4,41	5,25	3,17
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	juta rupiah	110.896,40	124.221,03	129.259,80
Per Capita of GDP at Current Price	million rupiahs			
Inflasi/Inflation (y-o-y)	%	1,09 <sup>8</sup>	4,82 <sup>8</sup>	1,53 <sup>8</sup>

Berdasarkan data kependudukan pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Indragiri Hilir sebanyak 695.571 jiwa. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 menurut data BPS sebesar 87.546.370.

$$\frac{\text{PDRB Adh Berlaku} \times 100}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$= \frac{87.546.370.00}{695.571 \text{ Jiwa}} = \frac{125.862.59.30}{87.546.75} = 143,77 \%$$

**Tabel 3.75**  
**Capaian Persentase PDRB Per Kapita**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PDRB Per Kapita	%	70,5	126	179 %	72,5	143	198 %

Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Persentase capaian Indikator kinerja persentase PDRB Perkapita tahun 2023 capaian realisasi 143 % dengan capaian kinerja 198 % naik 19 % dibanding tahun 2022.

### Nilai Investasi PMDN

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.

Menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggara investasi, baik PMDN 3 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan pemeratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinyu yang disebut sebagai pembangunan ekonomi. Investasi dalam negeri dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang dengan sangat baik, di mana jika investasi yang terjadi di dalam negeri mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat (Astini & Pasek, 2022; Jufrida et al., 2016). pemerintah daerah dalam hal ini sejatinya memiliki peran yang strategis dalam upaya menarik investasi.

**Tabel 3.76**  
**Capaian dan Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Rp. Milyar	Milyar	2.244	7.439	331,51	1.100	3.627	329,73

Sumber : LKJIP DPMPTSP Kab. Inhil 2024

Berdasarkan Rilis Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rp) sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 tercatat sebesar Rp10.670.586.840.000 (Sepuluh Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), capaian ini masih belum final, karena capaian realisasi Triwulan IV masih menunggu rilis dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, bila dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian realisasi investasi PMDN sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebesar 329,73%.

Realisasi investasi Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Triwulan III telah melebihi target realisasi investasi Tahun 2023 yang ditetapkan, dan membawa Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan penghargaan Kategori Realisasi Investasi Kabupaten / Kota peringkat II dari Gubernur Riau pada tahun 2023 atas capaian realisasi investasi tersebut. Adapun Penyebab keberhasilan dalam peningkatan atas capaian target kinerja disebabkan sebagai berikut: 1. Peningkatan kegiatan pengendalian dan pengawasan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun anggaran 2023 sehingga dapat dilakukan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian terhadap penanaman modal di Kabupaten Indragiri Hilir. 2. Peningkatan disiplin dalam pelaporan kegiatan penanaman modal oleh Pelaku Usaha sehingga realisasi investasi dapat tercatat sebagaimana mestinya.

### **Nilai Ekspor Bersih Perdagangan**

Nilai Ekspor bersih perdagangan (ekspor netto) adalah selisih antara ekspor perdagangan dan impornya. Bila ekspor netto positif, berarti lebih besar daripada impor, kesempatan kerja dan pendapatan nasional cenderung akan naik. Beberapa variable yang bisa mempengaruhi nilai ekspor netto adalah pertumbuhan ekonomi mitra dagang, pertumbuhan ekonomi domestic, harga relative domestic dan asing, nilai tukar, biaya produksi dan hambatan perdagangan. Permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Permintaan tersebut berasal dari konsumen domestik dan asing. Konsumen domestic terdiri dari sektor rumah tangga, sector bisnis dan sector pemerintah. Sementara itu konsumen asing juga terdiri dari tiga sektor ini. Ekspor meningkatkan permintaan agregat, tetapi impor mengurangi permintaan agregat. Karenanya ekspor neto positif

meningkatkan permintaan agregat. Dan sebaliknya, ekspor neto negative menurunkan permintaan agregat. Ekspor netto positif meningkatkan produk domestic bruto (PDB), dan ekspor neto negative menurunkan PDB.

**Tabel 3.77**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Nilai ekspor Bersih Perdagangan ( USD ) Juta	Juta/Us D	300,00	736,98	245,66%	330,00	914,00	276,97%

Tabel tersebut di atas menggambarkan perkembangan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan pada Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022) dimana pada Tahun 2022 tersebut Nilai Ekspor Bersih sebesar USD 736,98 dari target yang ditetapkan sebesar USD 300,00 ( dengan Kelebihan dari target yang di tetapkan sebesar 245,66%) dan pada tahun 2023 ditargetkan Nilai Ekspor Bersih sebesar USD 330,00 dengan Realisasi sebesar USD 914,00 ( dengan Kelebihan dari target yang di tetapkan sebesar 276,97%).

Berdasarkan data dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2023 yang dilakukan BRIN mengacu pada Global Competitiveness Index (GCI) Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data.

### **Indeks Daya Saing Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas (a) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (b) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.



### Klasifikasi Indeks Daya Saing Daerah

NO	KATAGORI	NILAI INDEX IDS
1	SANGAT TINGGI	3,76-5
2	TINGGI	2,51-3,75
3	SEDANG	1,26-2,5
4	RENDAH	0-1,25

Berdasarkan data dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya

guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2023 yang dilakukan BRIN mengacu pada Global Competitiveness Index (GCI) Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data.

Pada IDSD 2023 ini dilakukan perubahan terhadap beberapa indikator dan penyesuaian cara penghitungan skor sehingga diharapkan lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. DSD 2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks.

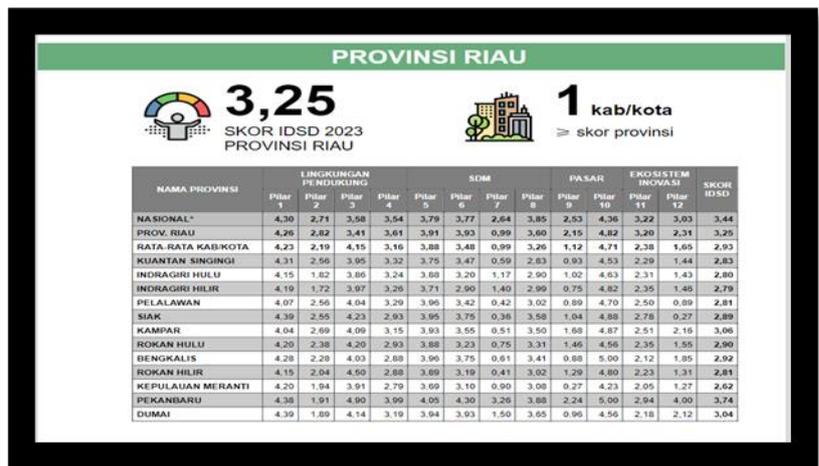
**Tabel 3.78**  
**Capaian dan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Tahun 2023		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Kategori	Sedang	Tinggi 2,82	113 %	Tinggi	Tinggi 2,79	100 %

Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2022 adalah 2,82, sedangkan untuk Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023 adalah 2,79. secara Realisasi capaian masih dalam kategori Tinggi walaupun ada penurunan sebesar 0,3 % dari tahun 2022. Indeks Daya Saing dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI, untuk merefleksikan tingkat produktivitas daerah melalui 12 pilar daya saing. Di antaranya yakni pilar Institusi, Infrastruktur, Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis, dan Kapabilitas Inovasi



Faktor Penyebab Keberhasilan dari Indeks Daya Saing Daerah adanya 12 pilar penopang pencapaian IDSD harus terus dikendalikan, melalui intervensi perencanaan yang baik, regulasi, serta anggaran yang terfokus agar kebijakan Pemerintah Daerah terhadap peningkatan kualitas Kabupaten dapat terus meningkat sejajar dengan Daerah lain dengan rincian sebagai berikut :



### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-8 dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

**Tabel 3.79**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-8**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	4,90%	3,17%	64,69%	Rp.6.373.464.242	Rp.4.238.471.456	66,50%	58,54% (20%)
2		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	1.100	3.627	329,73%	Rp.3,835,027,300	Rp.2,869,154,482	74,81%	
3		Meningkatnya Nilai Ekspor Daerah	330	914	276%	Rp.839.000.000	Rp.780,068,449	92,98%	
4		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Tinggi	Tinggi	100%	Rp.147.459.980	Rp.86.337.860	58,55%	

Dari tabel di atas dapat dilihat, penggunaan sumber daya pada Misi Ke-8 telah **Efisien**. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang menyentuh nilai maksimum 20%. Pada misi ke-8, terdapat 4 (empat) indikator yang menjadi masukan dalam formulasi.

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-8 dilakukan melalui 4 (empat) indikator yakni:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
2. Nilai Investasi PMDN
3. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan
4. Indeks Daya Saing Daerah

### 3.3 Akuntabilitas Anggaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 2.447.823.078.368- (Dua Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)**. Berpedoman pada proyeksi indikator ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja.
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut, maka kebijakan umum keuangan atau anggaran diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi alokasi, adalah penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta karena bersifat publik service seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur.
2. Fungsi distribusi, adalah penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya.
3. Fungsi stabilisasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diverifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam **Pendapatan Asli Daerah**, **Pendapatan Transfer**, dan **Lain-Lain Pendapatan Yang Sah** yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.80**  
**Struktur APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023**

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.043.103.729.840</b>
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	200.808.143.550
4.2.	Pendapatan Transfer	1.842.295.586.290
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	133.589.413.803
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.447.823.078.368</b>
5.1	Belanja Operasi	1.826.698.707.757
5.2	Belanja Modal	292.554.004.712

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.887.997.424
5.4	Belanja Transfer	316.691.368.475
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>404.719.348.528</b>

Kinerja sasaran yang dicapai pada tahun 2023 didukung oleh pelaksanaan program /kegiatan baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program / kegiatan untuk masing-masing sasaran dapat berjalan dengan baik. Dukungan anggaran belanja langsung maupun tidak langsung pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.81**  
**Dukungan Anggaran Belanja Langsung Maupun Tidak Langsung Tahun Anggaran 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Perangkat Daerah penanggung jawab	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian(%)
1.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		Bagian Organisasi Setda Kab. Inhil	Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp.51.349.600	Rp.49.652.375	96,69%
1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akip		Bagian Organisasi Setda Kab. Inhil	Program Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp.245.446.500	Rp.230.749.487	94,01%
		Nilai LPPD		Bagian Pemerintahan dan OTDA Setda Kab. Inhil	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.1.282.130.299	Rp.920.567.466	73,47%
		Opini BPK atas LKPD		BKAD Kab. Inhil	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.3.604.948.569	Rp.3.086.999.277	89,75%
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		DISKOMINFO Kab. Inhil	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.23.461.174.508	Rp.21.984.847.959	93,71%
		Indeks Inovasi Daerah		BAPPEDA Kab. Inhil	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.1.001.737.760	Rp.668.864.720	66,77%
1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat		Bagian Organisasi Setda Kab. Inhil	Program Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp.178.670.750	Rp.175.579.856	98,27%
		Rata-rata Capaian Pelayanan Publik						
2.1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur		DINAS PUTR Kab. Inhil	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Rp.2.569.736.000	Rp.2.534.572.901,71	91,81%
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Bersih		DINAS PUTR	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rp.7.561.360.800	Rp.6.711.418.235	88,76%
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan		DINAS PUTR	Belanja Modal bangunan pembuang pengaman sungai	Rp.118.760.000	Rp.40.836.000	34,39%

		Sanitasi Layak			(Drainase)			
2.1.2	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Presentase Penyediaan Infrastruktur		DINAS PUTR Kab. Inhil	Pengelolaan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.169.226.793.350	Rp.113.757.980.522,78	67,22%
2.1.3	Meningkatnya Pelayanan Transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang/Barang Melalui Terminal/Dermaga/Bandara Per Tahun		Dinas Perhubungan	Penyediaan angkutan umum untuk Jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam datu daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.211.466.000	Rp.1.203.381.330	99,33%
3.1	Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Pengelolaan Sumber Daya Alam		BAPPEDA	Koordiasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Rp.7.001.399.714	Rp.6.361.537.110	90,86%
3.2	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		DLHK	Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.648.608.000	Rp.598.265.654	92,24%
3.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualias Udara		DLHK	Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.357.866.425	Rp.284.835.165	79,59%
		Indeks Kualitas Air		DLHK	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbaya dan bercun (Limbah B3)	Rp.919.439.588	Rp.473.683.141	51,53%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan		DLHK	Pengelola keanekaragam hayati (KEHATI)	Rp1.490.258.200	Rp.1.289.323.988	86,52%
4.1	Meningkatkan Kualitas SDM Berdaya Saing Berbasis Iman dan taqwa	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp.153.128.791.669	Rp.140.146.233.290,67	91,52%
4.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur > 25 Tahun Harapan Lama Sekolah		Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp.189.364.214.943	Rp.74.169.742.530	39,17%
4.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup		Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan UKP dan UKM	Rp.95.846.267.236	Rp.77.379.164.782	80,73%
4.1.3	Pengeluaran Per	Pengeluaran Per Kapita		BAPPEDA	Koordiasi Perencanaan	Rp.1.101.660.506	Rp.919.942.006	83,51%

	kapita				Bidang Perekonoian dan Sumberdaya Alam			
5.1	Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	Indeks Partisipasi Sosial		BAPPEDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.1.226.825.470	Rp.998.575.731	81,40%
	Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat		DPMD	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp.1.226.825.470	Rp.998.575.731	81,40%
5.2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Status Indeks Desa Mambangun		DPMD	Program Penataan Desa	Rp.293.003.550	Rp.173.772.549	81,60%
5.2.2	Meningkatnya Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan Dalam Berbagai Sektor Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		DP2KBP3A	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	637.520.000	490.472.008	76,93
6.1	Meningkatkan Kerukunan, Kemanaan dan Ketentraman Sosial	Indeks Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Sosial		BAPPEDA	Penelitian dan Pengembangan	Rp.9.012.960.000	Rp.7.821.348.913	86,78%
6.1.2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak		DP2KBP3A	Progran Perlindungan Khusus Anak dan Progran Perlindungan Perempuan	Rp.345.147.900	Rp.288.443.709	83,57%
7.1	Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	PDRB Per Kapita		BAPPEDA	Koordiasi Perencanaan Bidang Perekonoian dan Sumberdaya Alam	Rp.1.101.660.506	Rp.919.942.006	83,51%
7.1.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin		Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.620.210.000	Rp.428.211.797	82,51%
7.1.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		DISNAKER	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS	Rp.2.345.173.200	Rp.221.940.004	9,46%

					TENAGA KERJA			
8.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi		BAPPEDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonoian dan Sumberdaya Alam	Rp.6.373.464.242	Rp.4.238.471.456	66,50%
8.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN		DPMTSP	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.3.835,027,300	Rp.2,869,154,482	74,81%
8.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor Daerah	Nilai Ekspor Benih Perdagangan		DISPERINDAG	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Rp.839.000.000	Rp.780,068,449	92,98%
8.1.4	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah		BAPPEDA	Analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.147.459.980	Rp.86.337.860	58,55%

# BAB IV PENUTUP



## 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran strategis dan capaian Misi RPJMD. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian IKU Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023, diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

**Misi 1:** “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Makin Responsif, Partisipatif, Inovatif, Efektif dan Berketaatan Hukum”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **84,33%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan/sasaran strategis:

1. Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)
2. Nilai AKIP (Nilai/Predikat)
3. Nilai LPPD (Nilai)
4. Opini BPK atas LKPD (Predikat)
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nilai)
6. Indeks Inovasi Daerah (Kategori)
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

**Misi 2:** “Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Seluruh Wilayah”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **89,38%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

1. Persentase Penyediaan Infrastruktur (Persentase)
2. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki air bersih (Persentase)
3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (Persentase)
4. Persentase Penyediaan Infrastruktur (Persentase)

5. Cakupan sarana dan prasarana angkutan (Persentase)

**Misi 3:** “Melanjutkan Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Secara Berkelanjutan Sesuai Potensi dan Kondisi Setempat”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **87.19%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Persentase)
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)
3. Indeks Kualitas Udara (Indeks)
4. Indeks Kualitas Air (Indeks)
5. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)

**Misi 4:** “Memantapkan Pembangunan SDM yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing Serta Meningkatkan Iman dan Taqwa”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **92,13%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)
2. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur > 25 Tahun (Tahun)
3. Harapan Lama Sekolah (Tahun)
4. Angka Harapan Hidup (Tahun)
5. Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)

**Misi 5:** “Meningkatkan Partisipasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **84,85%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

1. Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (Persentase)
2. Status indeks desa membangun (Nilai)
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)

**Misi 6:** “Memantapkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Kehidupan Sosial”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **100%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

1. Persentase keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (Persentase)
2. Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Persentase)

**Misi 7:** “Melanjutkan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **122.71%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

1. PDRB Per Kapita (Persentase)
2. Persentase Penduduk Miskin (Persentase)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persentase)

**Misi 8:** “Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Daerah”, pada tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar **192,61%** yang diukur berdasarkan capaian kinerja pada indikator tujuan / sasaran strategis:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persentase)
2. Nilai Investasi PMDN (Milyar Rupiah)
3. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US Dolar)
4. Indeks Daya Saing Daerah (Kategori)

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 ditetapkan 26 (dua puluh enam) sasaran dengan 34 (tiga puluh empat) indikator, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

❖ Terdapat **12 (dua belas)** atau **35,29%** Indikator Kinerja kategori **sangat baik**, yaitu:

- 1) Indeks Inovasi Daerah
- 2) Persentase Penyediaan Infrastruktur
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 4) Angka Harapan Hidup
- 5) Status Indeks Desa Membangun
- 6) Persentase keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial
- 7) Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 8) PDRB Per Kapita
- 9) Persentase Penduduk Miskin
- 10) Nilai Investasi PMDN
- 11) Nilai Ekspor Bersih Perdagangan
- 12) Indeks Daya Saing Daerah

❖ Terdapat **13 (tiga belas)** atau **38,24%** Indikator Kinerja kategori **baik**, yaitu:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi
- 2) Nilai AKIP
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat

- 4) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak
- 5) Persentase Penyediaan Infrastruktur
- 6) Cakupan sarana dan prasarana angkutan
- 7) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
- 8) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 9) Indeks Kualitas Udara
- 10) Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- 11) Rata –Rata Lama Sekolah Penduduk Umur > 25 Tahun
- 12) Harapan Lama Sekolah
- 13) Pengeluaran Per Kapita

❖ Terdapat **3 (tiga)** atau **8,82%** indikator kinerja kategori **cukup**, yaitu :

- 1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 2) Indeks Kualitas Air
- 3) Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat

❖ Terdapat **4 (empat)** atau **11,76%** indikator kinerja kategori **kurang**, yaitu:

- 1) Nilai LPPD
- 2) Persentase Rumah Tangga Yang memiliki air bersih
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- 4) Laju Pertumbuhan Ekonomi

❖ Terdapat **2 (dua)** atau **5,88%** Indikator Kinerja **belum didapatkan capaian kinerjanya** dikarenakan realisasi kinerja masih belum dirilis oleh beberapa Kementerian dan BPS untuk tahun 2022 yaitu:

- 1) Opini BPK atas LKPD
- 2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

## 4.2 Rencana Tindak Lanju

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, Kementerian PANRB perlu melakukan pra-evaluasi sebagai salah satu tahapan evaluasi SAKIP kepada instansi pemerintah pada tahun 2024.

Pelaksanaan pra-evaluasi ini perlu didukung dengan kelengkapan dokumen dan informasi yang memadai agar hasil pra-evaluasi dapat menggambarkan kondisi instansi pemerintah secara utuh. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun Matrik Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dari Rekomendasi sebagai berikut :

1. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja;
2. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen cascading kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun PD untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Memanfaatkan hasil perbaikan cascading kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi

4. Mengoptimalkan aplikasi e-sakip sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap perangkat daerah sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;
5. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN strategis yang harus diselesaikan
6. Menginformasikan Laporan Kinerja baik dari level pemerintah daerah maupun PD dalam website kabupaten sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
7. Melakukan revaluasi kembali terhadap penetapan target yang diperjanjikan tiap tahunnya dengan mempertimbangkan capaian periode sebelumnya sehingga mampu memacu pencapaian kinerja yang lebih baik;
8. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadikekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
9. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
10. Menyusun kebijakan reward and punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga dapat menjadi penyemangat setiap Perangkat Daerah untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP;

### **Rencana Aksi**

1. Pembinaan Penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026
2. Integrasi Penjabaran Kinerja melalui Cascading kedalam dokumen Perencanaan Daerah (RPD Tahun 2024-2026)
3. Penjabaran Cascading Kinerja sampai level Program
4. Mengembangkan dan Membangun Aplikasi E SAKIP SMART yang berdampak/terintegrasi ke Perangkat Daerah
5. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) disesuaikan dengan Cascading)
6. Publikasi LKJIP Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Website Resmi Pemerintah Daerah

7. Penyusunan Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD dan Renja PD Tahun Berjalan untuk penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan
8. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk Meningkatkan pemahaman evaluator dalam menyusun rekomendasi berdasarkan catatan hasil evaluasi pada KKE agar tepat sasaran untuk peningkatan implementasi SAKIP OPD yang di evaluasi
9. Monev tindak lanjut LHE AKIP Perangkat Daerah
10. Pemberian Reward kepada Perangkat Daerah yg memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja terhadap beberapa indikator kinerja tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Bupati Indragiri Hilir Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai harapan dengan total tingkat persentase ketercapaian sebesar **104,94%** atau kategori **Sangat Baik**. Namun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang belum diketahui dan belum tercapai. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan untuk pencapaian yang lebih baik dimasa mendatang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir kepada pihak-pihak terkait sebagai stakeholder atau pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan,       Maret 2023

Pj. Bupati Indragiri Hilir



Herman

# LAMPIRAN



# PERJANJIAN KINERJA

## BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023



### BUPATI INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD WARDAN  
Jabatan : BUPATI INDRAGIRI HILIR

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tembilahan, Mei 2023

Bupati Indragiri Hilir,  
  
Muhammad Wardan

#### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023

No Urut	No Indikator	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
1	1.1	Memingkatkan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,00
2	1.1.1	Memingkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai AKIP	Nilai/Produk	88
3			2. Nilai LPD	Nilai	Sangat Tinggi
4			3. Opini BPK atas LPD	Presisi	WTP
5			4. Jumlah Peristiwa Berbasis Elektronik (PBE)	Nilai	100
6			5. Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif/Zero One
7	1.1.2	Memingkatkan Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,22
8	2.1	Memastikan infrastruktur dasar	Persentase pelayanan infrastruktur	Persentase	11,20
9	2.1.1	Memastikan kualitas pelayanan infrastruktur pemukiman	1. Persentase Rumah Tangga yang memiliki air bersih	Persentase	12,00
10			2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan	Persentase	70
11	2.1.2	Memastikan infrastruktur pelayanan umum	Persentase Pelayanan Infrastruktur	Persentase	00
12	2.1.3	Memastikan pelayanan transportasi	Capaian target dari pelaksanaan angkutan	Persentase	71,00
13	2.1.4	Memastikan produktivitas sektor pertanian	Kelembagaan Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase	45,61
14	3.1	Memastikan pengalihan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup	Nilai	67,64
15	3.1.1	Memastikan kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Udara	Nilai	50,61
16			2. Indeks Kualitas Air	Nilai	11,78
17			3. Indeks Kualitas Tanah Lahan	Nilai	49,00
18	4.1	Memastikan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan takwa	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	68,04
19	4.1.1	Memastikan Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur > 25 tahun	Tahun	7,86
20			2. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	13,84
21	4.1.2	Memastikan tingkat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,4

No Urut	No Indikator	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
22	4.1.3	Pengalihan per kapita (Rp per kapita per tahun)	Pengalihan per kapita	Ribu Rupiah	14.200
23	5.1.1	Memastikan partisipasi dalam pembangunan	tingkat partisipasi masyarakat	Persentase	80
24	5.2	Memastikan pemerataan pembangunan	Status Indeks Desa Membangun	Status	0500
25	5.2.1	Memastikan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,00
26	6.1	Memastikan keamanan, ketertahan dan ketahanan sosial	Persentase keamanan, ketertahan dan ketahanan sosial (Indeks)	Persentase	100
27	6.1.2	Memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase pemenuhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PKKVA per kapita (RP))	Persentase	100
28	7.1	Memastikan kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persentase	71,1
29	7.1.1	Memastikan pengangguran	tingkat pengangguran terbuka (IPT)	Persentase	3,00
30	8.1	Memastikan pertumbuhan ekonomi dan Daya Saing Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,90
31	8.1.1	Memastikan investasi daerah	Realisasi Investasi PDRB	Ribuan Rupiah	1.100
32	8.1.2	Memastikan ekspor daerah	Nilai Ekspor Berbasis Perdagangan	Miliar Dolar	315
34	8.1.4	Memastikan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Kategori	Tinggi

Tembilahan, Mei 2023

Bupati Indragiri Hilir,  
  
H. Muhammad Wardan

# PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Adapun prestasi dan penghargaan yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023, diantaranya :

1. Penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kabupaten Indragiri Hilir kategori Kabupaten Sangat Inovatif Se-Indonesia.



- 1.
2. Penghargaan Atas Capaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.



3. Penghargaan kepada Kabupaten Indragiri Hilir dalam KI Riau Award Tahun 2023 Peringkat Informatif Se-Provinsi Riau



2. 4. Penghargaan kepada Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023



5. Penghargaan atas Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya Tahun 2022 kepada kabupaten Indragiri Hilir dari Gubernur Riau H.Edy Nasution pada 20 Desember 2023.



6. Penghargaan Terbaik I Kategori kinerja pemohon penilaian barang milik daerah tahun 2023 dan terbaik II kinerja lelang barang milik daerah tahun 2023.



7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2023 yang telah di Publikasikan oleh Kemenpan RB melalui Portal RB Nasional sebesar 71.79 %. Dengan Prediket BB (Sangat Baik) Secara Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Naik sangat signifikan dari B (Baik) menjadi BB (sangat Baik), dimana pada tahun 2022 Nilai RB memperoleh 62.19 dan pada tahun 2023 memperoleh Nilai RB menjadi 71.79 mengalami kenaikan 9,6 %



**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

# Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 2023



INDEKS RB KAB. INHIL  
MENGALAMI KENAIKAN  
9,6 POIN CAPAIAN  
INDEKS RB SEBESAR  
115 %



# bangga  
melayani  
bangsa